

SKRIPSI

**ANALISIS PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TERHADAP KASUS ANAK PUTUS SEKOLAH TINGKAT SMP
DI KABUPATEN SORONG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)



Oleh:

CONSTANTIN F. FERNANDEZ

NIM: 146520120042

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

2024

LEMBAR PESETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TERHADAP KASUS ANAK PUTUS SEKOLAH TINGKAT SMP
DI KABUPATEN SORONG**

**NAMA : Constantin F. Fernandez
NIM : 146520120042**

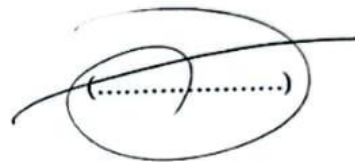
Telah di setujui oleh tim pembimbing

Pada 20 Mei 2024

Pembimbing I

I.Karmila Sinen, S.IP. M.I.P

NIDN. 1421068801




(.....)

Pembimbing II

2. Jusmin. M.Ec.Dev.

NIDN. 1401088801



(.....)

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Karmila Sinen, S.IP. M.I.P
NIDN/ 1421068801

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TERHADAP KASUS
ANAK PUTUS SEKOLAH TINGKAT SMP DI KABUPATEN SORONG**

Nama : Constantin F. Fernandez

Nim : 146520120042

Skripsi Ini Telah Disahkan Oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada 25 Juni 2024


Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Politik



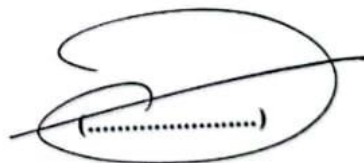
Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN. 1420089201

Tim Penguji Skripsi

1.Karmila Sinen, S.IP., M.I.P.
NIDN. 1421068801



2.Karmila Sinen, S.IP., M.I.P.
NIDN. 1421068801



3.Edy Supardi, S.Sos., M.P.A.
NIDN. 0012066601



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Sorong, 08 Mei 2024
Yang membuat pernyataan



Constantin F. Fernandez
NIM. 146520120042

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Lelah Boleh Menyerah Jangan”

Persembahan

Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah Swt dan dengan niat tulus ikhlas, kupersembahkan karya sederhana ini sebagai

Ungkapan bakti dan setia kepada:

Kedua orang tua ku tercinta yang dengan kesabaran dan kasih sayangnya selalu mendukung dan senantiasa mendoakanku dalam setiap sujudnya. Mendoakan keberhasilan, kesuksesan, dan keberkahan dimasa depan.

Almamaterku tercinta

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

ABSTRACT

Constantin F. Fernandez /146520120042. **ANALYSIS OF THE ROLE OF THE EDUCATION AND CULTURE DEPARTMENT IN THE CASE OF JUNIOR SCHOOL DROPOUTS IN SORONG DISTRICT** Thesis. Faculty of Law, Social and Political Sciences. Sorong Muhammadiyah University of Education. May, 2024.

This study aims to: (1) know and analyze the role of local governments in reducing the number of out-of-school children in Sorong Regency (2) describe the factors causing out-of-school children in Sorong Regency. This type of research is qualitative research, which is research that seeks to describe a symptom, event, event that occurs now. Meanwhile, qualitative research uses various types of qualitative studies in collecting data, namely interviews, observations, documentation, narratives, and text publications. The purpose of qualitative research is to describe a finding or a phenomenon, present what happens according to what is and facts or findings in the field. The results showed that: (1) the efforts or roles of local governments in reducing the number of out-of-school children in Sorong Regency include issuing policies in the field of education, education funding assistance, providing educational scholarships for the poor, poor student assistance programs (BSM), and socialization to the community; (2) Based on the cases found by the author in the field, the factors that cause children to drop out of school are lack of interest in school, family conditions that are not harmonious, weak family economy, environmental conditions where children live, community views on education.

Keywords: Dinas Pendidikan dan Budaya. School dropouts

ABSTRAK

Constantin F. Fernandez /146520120042. **ANALISIS PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TERHADAP KASUS ANAK PUTUS SEKOLAH TINGKAT SMP DI KABUPATEN SORONG** Skripsi. Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Politik. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Mei, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Sorong (2) menggambarkan faktor-faktor penyebab anak putus sekolah di tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Sorong. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Sementara itu, penelitian kualitatif menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, narasi, dan publikasi teks. Tujuan penelitian kualitatif adalah menjabarkan suatu temuan atau suatu fenomena, menyajikan apa yang terjadi sesuai dengan apa adanya dan fakta atau temuan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) upaya atau peran pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong dalam menekan angka anak putus sekolah di tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Sorong diantaranya mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, bantuan dana pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, program bantuan siswa miskin (BSM), serta sosialisasi kepada masyarakat.; (2) berdasarkan kasus yang ditemukan penulis di lapangan, faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah adalah kurangnya minat anak untuk bersekolah, keadaan keluarga yang tidak harmonis, lemahnya ekonomi keluarga, kondisi lingkungan tempat tinggal anak, serta pandangan masyarakat terhadap pendidikan.

Kata Kunci : *Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan . Anak Putus Sekolah*

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunia-nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " analisis peran dinas pendidikan dan kebudayaan terhadap kasus anak putus sekolah tingkat SMP di kabupaten sorong". skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk lulus sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun yang berguna untuk penyempurnaan selanjutnya. Penulis telah banyak menerima masukan, bimbingan dan bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan di prodi ilmu pemerintahan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Rustamadji, M.Si. selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong
2. Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I. sebagai Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik
3. Karmila Sinen, S.IP., M.I.P. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Pembimbing I yang sama-sama bertanggung jawab atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan yang cermat, koreksi yang membantu, saran serta dorongan yang mendukung selama konsultasi.
4. Jusmin, M.Ec.Dev. sebagai Pembimbing II yang sudah memberikan arahan, saran dan perbaikan sehingga proposal ini menjadi jauh lebih baik.

5. Semua dosen Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik atas ilmu yang berharga, serta nasehat-nasehat yang mendukung.
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Orang tua tercinta yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi yang besar selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa khususnya teman-teman seperjuangan saya di Jurusan Ilmu Pemerintahan, atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya

Akhirnya segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi karunia yang tidak terhingga dalam hidupnya. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti hal yang sama. Sekian dan Terima Kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sorong, 30 April 2024

Constantin F. Fernandez

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
<i>ABSTRACT</i>.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kajian Teori	8
2.1.1 Analisis	8
2.1.2 Pendidikan	10
2.1.3 SMP.....	14
2.1.4 Peran.....	16
2.1.5 Anak Putus Sekolah.....	19
2.1.6 Pemerintah	21
2.2 Peneliti Terdahulu.....	24
2.3 Kerangka Berfikir	28

2.4 konsep operasional.....	29
2.5 operasional variable.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Dan Desain Penelitian.....	31
3.1.1 Jenis Penelitian	31
3.1.2 Desain Penelitian	31
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	31
3.3 Sumber Data.....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5 Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.1.1 Letak dan Kondisi Geografis.....	36
4.1.2 Kondisi Sosial dan Budaya	42
4.1.3 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kab. Sorong	43
4.2 Peran Dinas Pendidikan Mengatasi Angkat Anak Putus Sekolah	53
4.3 Hambatan Peran Dinas Pendidikan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah..	60
4.4 Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah.....	61
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka berpikir.....	28
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	42

DAFTAR TABEL

Table 4.1 Indeks Pembangunan Manusia Kab. Sorong Bidang Pendidikan	42
Tabel 4.2 Daftar Anak Putus Sekolah.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Judul (Cover)

Lembar Persetujuan Pembimbing

Lembar Pengesahan

Lembar Keaslian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).¹

Berdasarkan asas desentralisasi tentunya pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah kini lebih leluasa dalam mengelolah serta meningkatkan potensi yang dimiliki daerahnya termasuk sumber daya manusia. Sehingga pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam menjamin hak masyarakatnya, dikarenakan pemerintah daerah yang lebih dekat secara wilayah serta memahami dan mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakatnya, dalam hal ini kebutuhan dasar masyarakat yakni di bidang pendidikan. Hal ini tentunya sesuai dengan peranan pemerintah sebagai edukasional yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat

¹ Nur Ervannudin, Bimo Wahyu Widodo (*Desentralisasi Pendidikan Dan Peran Aktif Masyarakat Menuju Pendidikan berkualitas*), Hal 148-152.

dalam membangkitkan kemampuan dan kesadarannya dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya dengan ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini pendidikan merupakan suatu kebutuhan primer, dimana orang-orang berlomba untuk dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin dan untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (*IPTEKS*). Hal ini dilakukan agar dapat mengarungi kehidupan yang serba canggih dan dapat mengikuti kuatnya pengaruh globalisasi yang merambah seluruh bidang kehidupan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendidikan sebagai salah satu investasi masa depan adalah suatu usaha yang sangat memegang peranan penting. Pendidikan akan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi orang-orang yang cerdas dan dapat memanfaatkan dan menyikapi seluruh kesempatan dalam memenuhi dan memperjuangkan kehidupan. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan akan menjadi budak globalisasi, yang mengombang-ambingkan kehidupannya dalam ketidakmampuan baik secara moril dan materiil.

Pendidikan sebagai salah satu kunci penting dalam proses perkembangan untuk memajukan suatu bangsa dapat dikatakan demikian manakala tingkat pendidikan suatu negara dikatakan tinggi, setidaknya peradaban dan pola pikir masyarakat di Negara tersebut haruslah tinggi pula. Keberhasilan suatu Negara banyak tergantung pada kemajuan tingkat pendidikanya, di Indonesia sendiri

banyak dijumpai berbagai masalah yang berkaitan dengan pendidikan, misalnya saja adalah anak putus sekolah.

Hal ini juga sejalan dengan amanat yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada salah satu butir yang tercantum di sana, dijelaskan bahwa adanya pencerdasan kehidupan bangsa, jelas ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar. Bagaimana respon pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi hal tersebut, karena secara tidak langsung orang yang tidak menyenangi pendidikan ataupun sudah dapat menyenangi akan tetapi putus di tengah jalan. bisa saja berasal dari anak-anak yang cerdas, bahkan sebaliknya. Akan tetapi terlepas dari hal itu, harus dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan utama yang tak dapat dikesampingkan, sebab pendidikan akan membentuk sikap mental manusia kepada perilaku budi pekerti luhur yang dapat membentuk keperibadian utama. Hal ini jelas telah di amanatkan oleh UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pengelolaan pendidikan berubah dari system sentralisasi ke sistem desentralisasi. Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan (Abdul Halim, 2001:15). Desentralisasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang di bidang pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh unit atau pejabat pusat kepada unit atau pejabat di bawahnya, atau dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah, atau dari pemerintah kepada masyarakat. Salah satu wujud dari desentralisasi ialah terlaksananya proses otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan.²

Dapat diartikan bahwa program desentralisasi pendidikan dengan kewenangan dan sumber dana finansial yang lebih besar merupakan jalan terang bagi pemerintahan kabupaten dan kota dalam menyikapi segala permasalahan yang ada, baik itu dalam pemerintahan, maupun dalam bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat membuat program-program dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Serta mendorong terjadinya proses otonomi baik pada pemerintah daerah maupun pada setiap satuan pendidikan agar memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, adil dan merata bagi setiap masyarakat.

Agar setiap daerah dapat menyelenggarakan pendidikan secara merata dan relatif tidak ketinggalan jauh dari daerah daerah lainnya, anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diantaranya yang disalurkan melalui berbagai skema akan berfungsi sebagai faktor penyeimbang sehingga masyarakat di setiap daerah dapat menerima pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan adil.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebenarnya sudah mengamanatkan tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk

² Abdul Halim, *Desentralisasi Pendidikan Nasional dan Implikasinya terhadap Pengembangan Pendidikan Islam (Kalimantan Timur; Abdan Rahim 28 Oktober 2017)*, halaman 75.

pembiayaan dan pembangunan pendidikan ini. Dalam pasal 49 ayat (1) dikemukakan bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dilokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, amanat yang jelas-jelas memiliki dasar dan payung hukum tersebut dengan berbagai dalih dan alasan belum terlaksana secara maksimal, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak bisa menyalurkan pendidikan di bangku sekolah.

Data Dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sorong menunjukkan masih adanya kondisi anak putus sekolah di tingkat SMP yang terjadi di Kabupaten Sorong setiap tahunnya menjadi ironi bagi pemerintah daerah, dimana kondisi anak SMP yang putus sekolah di Kabupaten Sorong pada tahun 2023 mencapai angka 104 anak, dengan rincian SMP Swasta sebanyak 90 anak, SMP Negeri sebanyak 14 anak. Kondisi demikian dapat dimaknai bahwa masih adanya anak usia sekolah menengah pertama yang belum menyelesaikan sekolahnya. Kondisi anak putus sekolah untuk anak usia sekolah tentunya sangat memprihatinkan. Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sorong, pada tahun 2023 ternyata masih cukup banyak yaitu lebih dari 100 orang.³

Pemerintah Kabupaten Sorong bertanggung jawab dalam menjamin dan memenuhi hak dasar masyarakat akan layanan dan peningkatan pendidikan untuk menjamin hak setiap warga masyarakat untuk menyalurkan pendidikan, demi

³ Hasil Wawancara Dengan Staff Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong. 01 Februari 2023

menciptakan masyarakat yang berkualitas maju, mandiri, dan sejahtera dengan membangun keunggulan komparatif di masing-masing wilayah dan didukung oleh kapasitas SDM yang berkualitas, sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sorong. Oleh sebab itu, bertolak dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TERHADAP KASUS ANAK PUTUS SEKOLAH TINGKAT SMP DI KABUPATEN SORONG”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong dalam menjamin dan memenuhi hak dasar masyarakat akan layanan dan peningkatan pendidikan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak putus sekolah tingkat SMP di Kabupaten Sorong?
3. Bagaimana peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menekan angka anak putus sekolah tingkat SMP di Kabupaten Sorong?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut maka hal yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran dan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap anak putus sekolah tingkat SMP di Kabupaten Sorong.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya anak putus sekolah tingkat SMP di Kabupaten Sorong.
3. Untuk mengetahui dinas pendidikan dan kebudayaan kab. Sorong dalam menjamin dan memenuhi hak dasar masyarakat akan layanan dan peningkatan pendidikan setiap warga masyarakat dalam mengenyam pendidikan.

1.4 Manfaat penelitian

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran bagi peneliti lain terkait anak putus sekolah.
2. Dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan penyusunan program pembelajaran serta menentukan metode dan media pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan kemampuan anak.
3. Dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dalam menekan angka anak putus sekolah tingkat sekolah menengah pertama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Analisis

Pengertian analisis dalam kamus Bahasa Indonesia (1990 : 32) adalah : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.

Soejadi (1997 : 107) mendefinisikan analisis sebagai berikut : Analisis adalah rangkaian kegiatan pemikiran yang logis, rasional, sistematis dan objektif dengan menerapkan metodologi atau teknik ilmu pengetahuan, untuk melakukan pengkajian, penelaahan, penguraian, perincian, pemecahan terhadap suatu objek atau sasaran sebagai salah satu kebulatan komponen yang utuh ke dalam sub komponen-sub komponen yang lebih kecil.

The Liang Gie (1989 : 26) mengemukakan pengertian analisis sebagai berikut : Analisis adalah segenap rangkaian perubahan pikiran yang menelaah sesuatu secara mendalam terutama mempelajari bagian-bagian dari suatu kebulatan untuk mengetahui ciri- ciri masing-masing bagian, hubungannya satu sama lain dan peranannya dalam keseluruhan yang bulat itu. di bidang administrasi analisis yang dilakukan itu tergolong dalam pengertian *logical analysis* (analisis dengan pikiran menurut logika) untuk dibedakan dengan analisis dalam ilmu alam atau kimia (*physycal atau chemical analysis*)

Selanjutnya Komaruddin (1994 : 31) mengemukakan pengertian analisis sebagai berikut : Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, sehingga dapat mengenal tandatanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan. Dari pengertian di atas, maka analisis menyangkut beberapa unsur pokok antara lain sebagai berikut :

1. Analisis merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang didasari pikiran yang logis mengenai suatu hal yang ingin diketahui.
2. Mempelajari bagian pembagian secara rinci dan cermat sehingga apa yang ingin diketahui menjadi gambaran yang utuh dan jelas.
3. Ada tujuan yang ingin dicapai yaitu pemahaman yang tepat terhadap sebuah objek kajian.

Menurut Handoko (2000 : 24) analisis secara sistematis adalah mengumpulkan, mengevaluasi dan mengorganisasi informasi tentang sesuatu pekerjaan-pekerjaan.

2.1.2 Konsep Pendidikan

Secara simologi, kata pendidikan berasal dari kata dasar “didik” yang mendapat imbuhan awalan dan akhiran pe-an. Berubah menjadi kata kerja mendidik, yang berarti membantu anak untuk menguasai aneka pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang diwarisi dari keluarga dan masyarakat. Istilah pendidikan ini berasal dari bahasa Yunani yaitu “paedagogie”, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak, dan paedagogia adalah pergaulan dengan

anak-anak, istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan "education" yang berarti pembangunan atau bimbingan.

Menurut Panagan (dalam Saputra, 2017 Vol 4, No 2). Pendidikan adalah tiang rancang kebudayaan dan pondasi utama untuk membangun peradaban bangsa. Kesadaran akan arti penting pendidikan dalam menentukan kualitas kesejahteraan lahir batin dan masa depan warganya. Oleh dari itu, substansi pendidikan materi pengajaran dan metodologi pembelajaran, serta manajemen pendidikan yang akuntabel sudah seharusnya menjadi perhatian bagi para penyelenggara Negara, Terbukti bahwa seluruh bangsa yang berhasil mencapai tingkat kemajuan kebudayaan dan teknologi tinggi meski disangga oleh kualitas pendidikan yang sangat kokoh.

Dalam *Dictionary Of Education* menyebutkan bahwa pendidikan adalah dimana proses seseorang mengembangkann kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku di dalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial yaitu dimana orang akan dihadapkan oleh pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga mereka bisa memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum. sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1930, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, dan karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak tidak boleh dipisah-pisahkan bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kta didik selaras dengan dunianya (Fuad Ihsan, 2011:4).

Pendidikan adalah instansi pendidikan yang formal, dan instansi pendidikan formal terpenting dalam masyarakat kita adalah bersekolah yang menawarkan pendidikan formal mulai dari jenjang persekolahan sampai ke jenjang pendidikan tinggi yang bersifat umum maupun khusus. (Sunarto, 2004:65).

Adapun fungsi pendidikan adalah sebagai alat untuk membebaskan manusia dari kebodohan, penindasan, ketertinggalan dan kemiskinan yang melanda masyarakat Indonesia. Dengan demikian diharapkan upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat direncanakan secara tepat sasaran sesuai dengan potensi dan hambatan di masing-masing daerah. (Fitriani, 2018 Vol 3, No 1).

Tujuan pendidikan adalah suatu faktor yang dimana sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan pendidikan ini adalah arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidik. Dalam penyelenggaraannya pendidikan tidak dapat dilepaskan dari sebuah tujuan yang hendak dicapai, hal ini dapat dibuktikan dengan penyelenggaraan pendidikan yang di alami bangsa Indonesia dari masa ke masa, saat ini dan selanjutnya. tujuan pendidikan yang berlaku pada masa Orde Lama berbeda dengan tujuan pendidikan pada masa Orde Baru. Sejak Orde Baru hingga sekarang, urusan mengenai tujuan pendidikan selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia (Rahmat Hidayat, 2019:25).

Unsur-unsur dalam sebuah pendidikan ini adalah :

- a) Usaha (kegiatan) usaha ini bersifat bimbingan (pimpinan atau pertolongan) dan dilakukan secara sadar,
- b) Ada pendidik, pembimbingan atau penolong,

- c) Ada yang terdidik atau di terdidik,
- d) Bimbingan yang mempunyai dasar dan tujuan,
- e) Dalam usaha itu tentu terdapat alat-alat yang di pergunakan,

Selanjutnya macam-macam tujuan pendidikan (Yusuf, 2018;31-32) sebagai berikut;

1. Tujuan umum; Rumusan tujuan umum pendidikan adalah rumusan tujuan pendidikan yang bersifat luas dan mencakup seluruh hakekat kemanusiaan secara universal. Tujuan umum pendidikan biasanya dirumuskan dengan memperhatikan aspek-aspek yang bersifat universal.
2. Tujuan khusus; tujuan khusus pendidikan merupakan penjabaran yang bersifat detail dari rumusan tujuan umum pendidikan tujuan khusus biasanya ditentukan karena adanya faktor-faktor lain sehingga tujuan pendidikan yang akan dicapai menjadi bersifat khusus pula. misalnya perbedaan lingkungan sosial masyarakat, perbedaan institusi lembaga pendidikan, atau bahkan perbedaan adat istiadat yang bersifat lokal.

Menurut Dwi Nugroho Hidayanto (dalam Yusuf, 2018;34). yang bertanggung jawab atas pendidikan itu meliputi :

- a) Orang dewasa
- b) Orang tua
- c) Guru
- d) Pemimpin masyarakat
- e) Pemimpin agama

Melihat berbagai defenisi pendidikan diatas,maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pendidkan sangat penting bagi siswa dan siswi agar terwujudnya

kepribadian yang baik pada diri setiap anak. Dan harapan terhadap dunia pendidikan sangat besar karena bias membawa peserta didik kearah yang memiliki kualitas hidup yang baik.

2.1.3 Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia (Badan Standar Nasional Pendidikan). SMP dapat ditempuh setelah lulus dari Sekolah Dasar (atau sederajat). Masa studi Sekolah Menengah Pertama yaitu selama tiga tahun, mulai dari kelas VII sampai kelas IX. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017), usia siswa pada tingkat SMP di Indonesia berkisar antara 13-15 tahun. Siswa yang berusia 13-15 tahun dalam tahap perkembangan berada di masa remaja. Santrock (2014) menyebutkan bahwa masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, dimulai dari usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 atau 21 tahun, ditandai dengan perubahan biologis, sosiemosional, dan kognitif. Hal ini sejalan dengan pendapat Papalia (2013) yang menjelaskan masa remaja sebagai masa peralihan yang berlangsung sejak usia 10 atau 11 tahun, hingga masa remaja akhir atau usia 20-an awal. Transisi dari Sekolah Dasar (SD) ke SMP menjadi salah satu masa transisi tersulit yang dialami oleh individu (*Niesen & Wise, 2004*). Anderman (dalam *Santrock, 2014*) berpendapat bahwa transisi ke sekolah menengah pertama bisa menjadi sulit dan membuat stress bagi banyak siswa. Transisi ke sekolah menengah merupakan masa dengan beberapa tugas perkembangan yang melibatkan banyak tantangan, diantaranya akademik, proses

pembuatan keputusan, perubahan sosialisasi dengan teman sebaya, dan keputusan vokasional penting lainnya (Costa & Faria, 2017).

Setelah lulus dari SD, siswa akan memasuki SMP dan berada pada kelas VII. Blyth dan Simmons (dalam Puspasari, Kuwanto & Wijaya, 2012. 17(1), 69-75.) mengemukakan bahwa transisi di kelas VII lebih berdampak buruk dari pada transisi yang terjadi di masa mendatang. Dampak psikologis yang dapat dialami siswa saat gagal pada masa transisi seperti penarikan diri secara psikologis yang ditandai dengan berkurangnya keterlibatan dan komitmen pada aktivitas yang sedang dilakukan siswa, rendahnya tingkat partisipasi dan aspirasi di kelas, rasa terasing, meningkatnya ketegangan dan rasa tidak puas, bahkan siswa melakukan penolakan pada pelajaran, dan menolak bersikap kooperatif (Johnson, 1970) Apabila siswa mampu mengatasi perubahan yang terjadi pada masa transisi ini, siswa akan menunjukkan prestasi yang bagus dalam hal pendidikan maupun bidang lainnya (Puspasari, dkk., 2012, 16(2), 194).

2.1.4 Konsep Peran

Pemerintahan pada dasarnya adalah sebuah sistem social. Unsur terkecil dari sistem sosial adalah norma-norma (norms) yang bersangkutan yang kemudian menciptakan peran-peran (*roles*). Himpunan peran-peran akan membentuk sebuah status. Himpunan dan hubungan fungsional antara status akan menciptakan sebuah situs sosial. Ada lima elemen yang membangun sebuah sistem sosial, ke lima elemen tersebut yaitu :

- a) Norma, sebagai unit terkecil dari sistem social (*the norms*).
- b) Peran-peran (*roles*) merupakan struktur yang terdiri dari norma- norma.

- c) Status posisi atau posisi (*the status-position*), yang menggambarkan lokasi actor dalam sistem sosial.
- d) Situs (a situs), menggambarkan status posisi aktor dalam sistem sosial yang kompleks dibandingkan status-sosial aktor lain.
- e) Lingkungan (*station*), menggambarkan lokasi actor di dalam komunitas yang di dalamnya terdapat stratifikasi sosial.

Peran menurut Poerwadarminta (1995:751) adalah “ tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang dalam suatu peristiwa ”berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau kelompok orang dalam peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Menurut Levinson (Soekanto, 2012:213) mengatakan peran mencakup tiga hal yaitu:

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b) Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang ditulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012 : 12 dan 21), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu

1. Peran antar pribadi (*interpersonal role*) dalam peranan antar pribadi, atasan baru
 - Tindakan sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagaimana penghubung agar Organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg Dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antar pribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Peranan sebagai tokoh (*figurehead*) yaitu yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 - b. Peranan sebagai pemimpin (*leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotivasi, mengembangkan dan mengendalikan.
 - c. Peranan sebagai pejabat perantara (*leason manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berbeda diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.
2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*informational role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:

- a. Peran pemantau (monitor). Peranan ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi.
 - b. Sebagai diseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk menangani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang didampinginya.
3. Peranan pengambilan keputusan (*decisional role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena
- a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
 - b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.
 - c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya.

Kesimpulan Peran dan Peranan

- Peran melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai suatu kewajiban.
- Peranan status atau jabatan maupun kedudukan yang dimiliki seseorang.

2.1.5 Konsep Anak Putus Sekolah

Singgih (dalam Rahmad dkk, 2016) mengutarakan bahwa anak adalah generasi penerus bagi kalangan hidup keluarga, bangsa dan Negara di masa mendatang. Karena itu bisa memberikan jaminan bagi generasi penerus untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik merupakan investasi sosial masa depan yang tidak murah dan harus dipikul oleh keluarga, masyarakat dan Negara.

Menurut E.M. Sweeting dan Muchlisoh dalam laporan teknis Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum (1998:14) mengatakan bahwa Siswa yang putus sekolah merupakan siswa yang tidak melanjutkan pendidikan selama 6 tahun sekolah dasar dan karena itu mereka tidak memiliki ijazah SD. Pengertian mengenai siswa putus sekolah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah siswa yang belum sampai tamat sekolahnya sudah berhenti. Pendapat dari (Ali Imron, 2004:125) menyatakan bahwasanya yang dimaksud siswa putus sekolah adalah siswa yang dinyatakan telah keluar dari sekolah yang bersangkutan sebelum waktu yang telah ditentukan atau sebelum dinyatakan lulus dan mendapat ijazah dari sekolah.

Menurut (Gunawan, 2011:91) bahwa anak putus sekolah adalah predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak bisa menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan berikutnya, hal ini menyatakan putus sekolah ditujukan oleh seorang yang pernah bersekolah namun berhenti untuk bersekolah.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai pengetahuan dari siswa putus sekolah, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa siswa/siswi yang putus sekolah

adalah siswa yang tidak melanjutkan pendidikannya atau memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya di sekolah

Siswa yang putus sekolah pastinya tidak datang secara sendiri menima diri siswa tersebut. Pastinya ada faktor yang melatar belakangi hal itu bisa terjadi dalam hasil kajian yang dilakukan oleh Sukmadinata (Bagong Suyanto 2010:324) mengatakan bahwa ada faktor utama siswa putus sekolah adalah kesulitan di bidang ekonomi atau dikarenakan orang tua siswanya tidak mampu untuk menyediakan biaya bagi putra-putrinya untuk bersekolah. Sedangkan menurut Ahmad (2011:134-135) menyatakan bahwa ada beberapa faktor menyebabkan anak mengalami putus sekolah yaitu :

- a) Adat istiadat tertentu,
- b) Lemahnya kemampuan murid untuk meneruskan belajar dari satu kelas ke kelas selanjutnya,
- c) Kecilnya pendapatan orang tua,
- d) Kurangnya perhatian dari pihak sekolah,

Sementara itu pendapat lain mengenai faktor penyebab siswa putus sekolah juga disampaikan oleh Nana Aukmadinata (Bagong Suyanto 2010:342- 343) yang menyatakan bahwa jumlah beberapa yang melatar belakangi mengapa siswa sampai tinggal kelas adalah sebagai berikut ;

- a. Sistem yang digunakan oleh sekolah tersebut. Biasanya sekolah-sekolah pada umumnya akan menggunakan sistem maju secara berkelanjutan atau maju secara otomatis, namun jika sekolah tersebut menggunakan system tidak naik kelas,

maka bisa dimungkinkan akan lebih banyak siswa yang putus sekolah akibat malu dikarenakan akan bertemu dengan adik kelasnya di semester berikutnya.

- b. berhubungan langsung dengan kemampuan usaha dari siswa tersebut. Bisa dikatakan bahwa siswa yang mempunyai semangat belajar yang tinggi akan mempengaruhi prestasi yang akan didapatkan, sedangkan siswa yang mempunyai daya tarik yang lemah terhadap belajar. maka dimungkinkan prestasi belajarnya juga akan kurang. Oleh karena itu, siswa dengan faktor yang kurang seperti ini mempunyai peluang untuk putus sekolah yang tinggi.

2.1.6 Konsep Pemerintah

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Secara ilmiah, pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan perintah sebagai fungsi dari pada pemerintah. Istilah pemerintah dalam organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara dan pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:6) pemerintah adalah : Organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di perintah. Dalam hubungan itu sah (legal) dalam

wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.⁴

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil (sipil) tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Baik pemerintah maupun yang diperintah berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu terhadap yang lain, baik timbale balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hal inilah yang membentuk hubungan pemerintahan. Berbagai konsep tentang pemerintah antara lain:

1. Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga Negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.
2. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara yang oleh konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini telah diatur dalam UUD 1945, di mana dinyatakan bahwa Kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Bahkan kepada presiden dilimpahkan “*concentration of power and responsibility*” (terpusat pada kekuasaan dan tanggung jawab)”.

⁴ Taliziduhu Ndraha, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan 1 Baru Jakarta : Rineka Cipta, 2015)

3. Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan Negara pada tingkat pusat (tertinggi); pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah.
4. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah Berbeda dengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili Negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.

Peranan pemerintah daerah berarti kedudukan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Selanjutnya peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan semua hak, wewenang dan kewajibannya tentunya harus sesuai dengan perannya yakni berdasarkan kedudukannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam ranah pemerintahan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul peneliti	Perbedaan	persamaan
Fani Fitriani	Peran Dinas Pendidikan Dalam Perumusan Pelaksanaan Pencegahan Anak Rawan Putus	-Judul -Lokasi penelitian -Teori Kewenangan Pemerintah	-Metode peneltian -Konsep Pendidikan -Membahas tentang anak putus sekolah

	Sekolah di Kota Pekanbaru		
Ricardo Saputra	Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah Pada Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar	-Judul -Lokasi Penelitian -Memakai indikator dampak	-Metode Penelitian -Konsep Pendidikan -Membahas tentang anak putus Sekola
Anggraini Helda	Peran Dinas Pendidikan Kota Medan Dalam Menangani Anak Putus Sekolah Sesuai Dengan UU No.20 Tahun2003 Tentang Sisdiknas	-Judul -Lokasi Penelitian	-Metode Penelitian -Konsep Pendidikan -Membahas tentang anak putus sekolah
Yani Takua	Peran Stakeholder Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Ambon.	-Judul -Lokasi Penelitian	-Metode Penelitian -Konsep Pendidikan -Membahas tentang anak putus sekolah
Ahmad Fauzi	Analisis Peranan Pemerintahan Daerah Terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo	-Judul -Lokasi Penelitian	-Metode Penelitian Membahas tentang anak putus sekolah -Konsep Pendidikan

Dari kelima penelitian tersebut dapat diketahui beberapa perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang dilakukan. Perbedaan dan persamaan tersebut yaitu :

a. Perbedaan

Pada penelitian pertama berbeda dengan penelitian ini yaitu dari segi judul, lokasi penelitian yang dilakukan di Pekanbaru dan fokus penelitian Peran Dinas Pendidikan dalam perumusan pelaksanaan pencegahan anak rawan putus sekolah di Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan yaitu Kewenangan Pemerintahan.

Pada Penelitian Kedua yang berada dengan penelitian ini yaitu dari segi judul, lokasi penelitian di kota Pekanbaru dan teori yang digunakan teori Peran Thoha (2007), Fokus Penelitian mengatasi anak putus sekolah pada jenjang pendidikan SD Tahun 2012-2015 bukan kinerja baik secara optimal karena indikator dampak (*impacts*) masih lemah pengawasan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang dana BOS sehingga terdapat indikasi penyalahgunaan dana BOS.

Penelitian ketiga yang berbeda yaitu dari segi judul, lokasi penelitian di penelitian ini dilakukan di jalan pelita IV No.77, Kampung Durian, Medan dengan fokus penelitian pada tujuan dan sarannya hasil dari penelitian ini bahwasanya tingkat Putus Sekolah di Kota Medan mengalami penurunan, data ini didapat dari data pokok Pendidikan .

Penelitian ke empat berbedayaitu dari segi judul, lokasi penelitian di Kota Ambon, Provinsi Maluku. dengan fokus penelitian Pemerintah Kota Ambon secara jelas berusaha untuk mengoptimalkan dan meminimalisasi serta menekan angka anak putus Sekolah di Kota Ambon.

Penelitian kelima berbeda dengan penelitian ini yaitu dari segi judul lokasi penelitian, lokasi penelitian ini di Kabupaten Wajo. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peranan pemerintahan daerah dalam menekan angka anak putus Sekolah di Kabupaten Wajo.

b. Persamaan

Dari kelima penelitian tersebut adanya persamaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian pertama dengan dengan penelitian ini memiliki persamaan dari segi metode peneltian yang digunakan kualitatif menggunakan konsep peran, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dinas pendidikan bisa mengatasi anak putus sekolah sehingga tidak banyak lagi anak-anak yang putus sekolah.

Pada penelitian kedua memiliki persamaan dengan penelitian ini dari segi metode penelitian yang digunakan kualitatif secara deskriptif dan menggunakan konsep peran guna mewujudkan anak-anak tidak putus sekolah di Kota Pekanbaru.

Pada penelitian ketiga ini memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan kualitatif dan menggunakan konsep peran, untuk mewujudkan berkurangnya anak putus sekolah di Kota Medan.

Pada penelitian keempat ini memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan kualitatif guna menjadikan Kota Ambon sebagai kota pendidikan di wilayah Timur Indonesia dalam mengurangi jumlah anak putus sekolah.

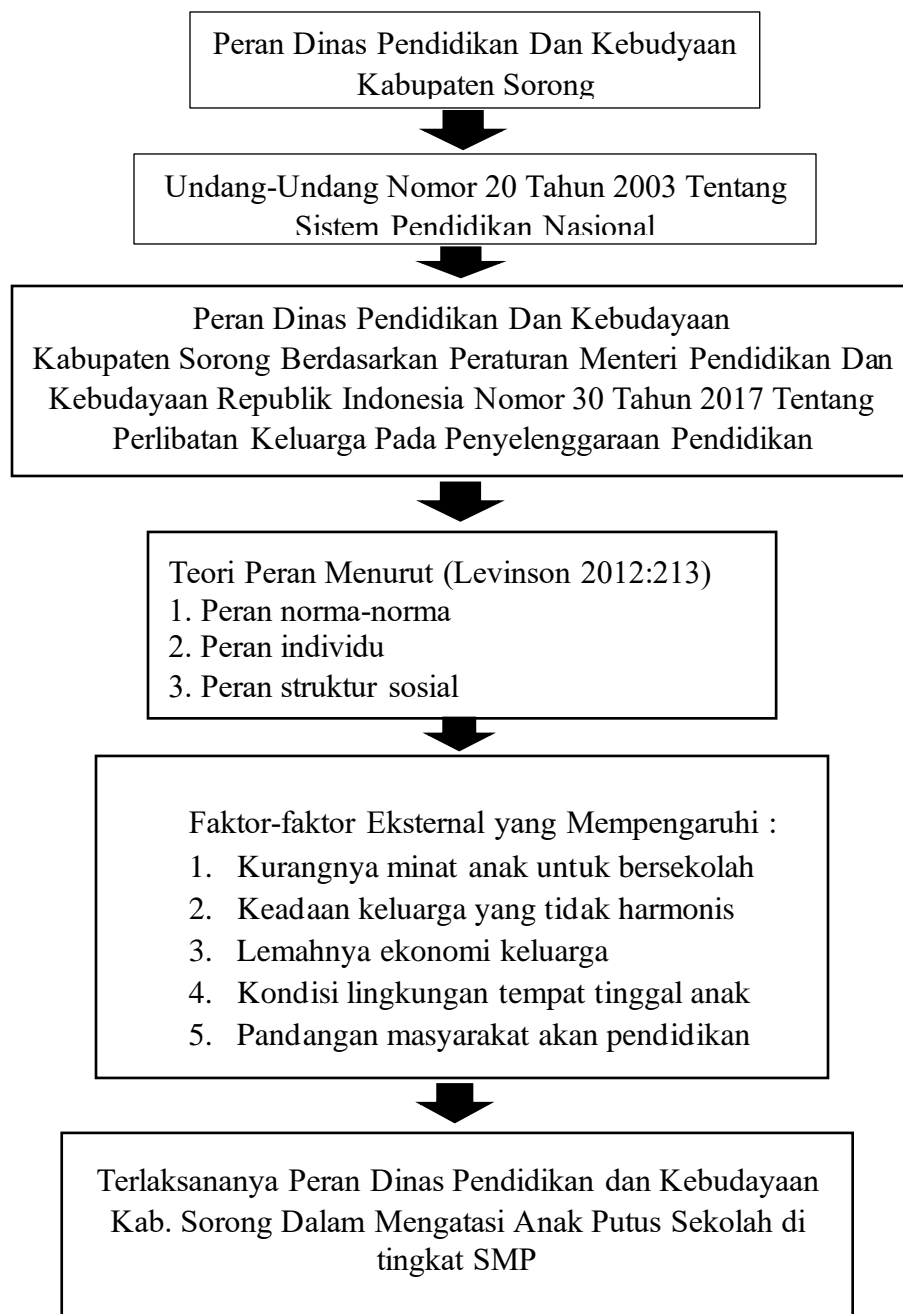
Pada penelitian kelima ini memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan kualitatif guna mewujudkan kota Wajo peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo .

Berdasarkan kelima perbedaan dan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka dapat di simpulkan terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain sebagai berikut :

- Kebijakan di bidang pendidikan;
- Bantuan dana pendidikan;
- Pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin;
- Program BSM (Bantuan Siswa Miskin);
- Sosialisasi kepada masyarakat;

2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini, sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir

2.4 Konsep Operasional

Dalam penelitian ini konsep operasional bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu di jelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

- a. Peran adalah (*role*), yaitu aspek dinamis kedudukan (*status*) apabila seseorang melaksanakannya hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peranan .
- b. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang dimana telah di sepakati dengan pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh memiliki wewenang untuk dijadikan pedoman.
- c. Implemenasi kebijakan merupakan salah satu pengetahuan keputusan tentang hal yang mendasar tertuang dalam Undang-Undang, namun juga berbentuk instruksi-instruksi penting dari eksekutif atau keputusan perundangan.
- d. Pendidikan merupakan suatu pembelajaran dan pondasi utama untuk membangun peradaban bangsa.
- e. Peranan Norma-norma adalah peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (*norma*)
- f. Peranan individu adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi (*individu*).
- g. Peranan struktur sosial adalah prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (*struktur sosial*).

2.5 Operasional Variabel

konsep	variabel	indikator	Sub indikator
<p>Peranan(role)merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. (Levinson dalam Soekanto, 2012;213)</p>	<p>Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>	<p>1.Peranan norma-norma</p> <p>2.Peranan Individu</p> <p>3.Peranan struktur sosial</p>	<p>a.Memberikan sosialisasi terkait anak putus sekolah b.Memberikan dampak-dampak yang terjadi bila putus sekolah.</p> <p>a.Pengarahan kepada siswa/siswi agar tidak terjadinya putus sekolah. b.Memberitahukan bahaya-bahaya apa yang akan terjadi jika putus sekolah.</p> <p>a.Membuat program-program pendidikan untuk mengatasi anak putus sekolah b.meningkatnya pencapaian target penyelesaian masalah anak putus sekolah</p>

Sumber : data olahan penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. sementara itu, penelitian kualitatif menggunakan berbagai jenis studi kualitatif dalam mengumpulkan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, narasi, dan publikasi teks. tujuan penelitian kualitatif adalah menjabarkan suatu temuan atau suatu fenomena, menyajikan apa yang terjadi sesuai dengan apa adanya dan fakta atau temuan di lapangan.

3.1.2 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variable yang akan menjadi topik penelitian. desain penelitian dengan data primer/sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer atau data sekunder.

3.1.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan yaitu Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Sorong.

3.1.4 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, staff Dinas pendidikan bidang SMP .
2. Data Sekunder yaitu data dari pihak yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menjadi objek penelitian ini meliputi :
 - a. Keadaan geografis lokasi penelitian
 - b. Struktur organisasi dinas pendidikan
 - c. Peraturan perundang-undangan
 - d. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana

3.1.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh yang diperlukan, maka penulis disini menggunakan teknik-teknik pengumpulan data antara lain :

1. Wawancara Kualitatif Wawancara yang dimaksud Creswell (2014;254) yaitu peneliti melakukann face-to-face interview (wawancara berhadapan) dengan partisipan, wawancara, merekam dengan telepon, atau

terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok).

2. Observasi Kualitatif Observasi adalah ketika penulis langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian. (Creswell,2014:254). Observasi bisa dikatakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap fenomena objek yang terjadi atau diteliti, sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang sulit diperoleh dari orang-orang yang dijadikan sumber data.
3. Dokumentasi Kualitatif Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (Koran, makalah, laporan, kantor) atau pun dokumen privat (buku harian, diari, surat e-mail). (Creswell,2014;255)

3.1.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bagian akhir dari suatu penelitian yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat melakukan wawancara dan observasi pada subjek, dan objek penelitian, dalam hal ini peneliti harus sudah melakukan analisis terhadap jawaban maupun hal-hal yang diamati serta dokumentasi yang diwawancarai. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya bisa valid. Dengan demikian, berdasarkan ciri-ciri tersebut, pengertian analisis adalah sebagai suatu tindakan untuk menjawab permasalahan berdasarkan observasi, pengolahan data, dan akhirnya penarikan kesimpulan, sehingga penyelesaian dari permasalahan tersebut

dapat diketahui dengan tepat dalam penelitian kualitatif proses analisis dan interpretasi data memerlukan cara berpikir kreatif, kritis dan sangat hati-hati. Kedua proses tersebut merupakan proses yang saling terkait dan sangat erat hubungannya. Analisis data merupakan proses untuk pengorganisasian data dalam rangka mendapatkan pola-pola atau bentuk-bentuk keteraturan. Sedangkan interpretasi data adalah proses pemberian makna terhadap pola-pola atau keteraturan-keteraturan yang ditemukan dalam sebuah penelitian. Data yang terkumpul diharapkan dapat merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Proses penyusunan data dapat berbeda-beda antar peneliti tergantung selera, pengalaman, dan kreatifitas berfikir sehingga data yang terkumpul dapat mempengaruhi pemilihan analisis data.

Proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen (pustaka). Langkah berikutnya reduksi data yang dilakukan dengan cara abstraksi. Abstraksi merupakan upaya membuat rangkuman dari segala data yang ada. Kemudian, menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan ini dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Pengkategorian ini dilakukan dengan cara koding. Langkah terakhir, penafsiran data yang telah diuji (verifikasi) untuk dijadikan beberapa metode tertentu. Sebagai suatu komponen dalam menyelesaikan suatu permasalahan, analisis memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Untuk mengidentifikasi ciri-ciri permasalahan yang dihadapi, sehingga nantinya dapat diketahui langkah-langkah penyelesaiannya secara tepat dan sesuai.

b. Untuk memberikan spesifikasi atau keterangan terperinci mengenai objek permasalahan yang dianalisis.

c. Memberikan gambaran dasar mengenai simpulan dan strategi yang akan dilakukan.

Secara umum, proses analisis berfungsi sebagai media menemukan alternatif atau gambaran dasar penyelesaian atas masalah yang diteliti. Selain itu, penguraian data atau keterangan di dalam tindakan analisis harus dilakukan secara teliti dan hati-hati karena hasil analisis akan sangat mempengaruhi kesimpulan dan solusi atas masalah tersebut. aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

1. *Data reduction* (Reduksi Data).

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih-milih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data ini dapat dibantu dan dipermudah dengan menggunakan komputer dalam melakukan penyajian data.

Proses reduksi ini dengan cara memilah dari hasil wawancara yang telah di transkrip, kemudian data tersebut dipilih menurut rumusan penelitian dan diperdalam dari pertanyaan penelitian. Hal selanjutnya adalah dengan cara koding dari transkrip tersebut lewat rumusan masalah.

2. *Data display* (Penyajian Data)

Penyajian data ini adalah suatu penyajian data ke dalam bentuk yang lebih jelas dan lebih terperinci lagi. Dalam penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data ini diperuntukan agar memudahkan pembaca untuk memahami apa yang terjadi di lapangan yang berisi kumpulan dari hasil wawancara, observasi dan juga studi dokumen. Dalam penyajian data penelitian ini, dilakukan peneliti dalam bentuk teks, tabel, dan gambar dari hasil reduksi data serta penyajian dan selalu diperbaharui setiap adanya data baru yang masuk.

3. *Valid Conclutin Drawing/ Verification*

Pada tahap yang terakhir ini adalah tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti yaitu pertama peneliti melakukan wawancara, observasi dan studi dokumen yang disebut dengan tahap pengumpulan data. Peneliti dalam hal ini membuat kesimpulan .

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pemerintah Kabupaten Sorong awal mulanya dibentuk oleh Sultan Tidore guna perluasan wilayah kesultanan dengan diangkat 4 (empat) orang raja yang disebut kalano muraha atau raja empat. Keempat raja adalah raja fan gering, raja fan malaba, raja fan mastarai dan raja fan malanso yang diangkat sesuai dengan 4 pulau besar yang tersebar dari gugusan pulau-pulau Raja Ampat Yakni Waigeo, Missol, Salawati dan Batanta. Selain mengangkat raja-raja, pemberian nama pangkat dan jabatan pun diberikan oleh kesultanan Tidore seperti Sangaji (bidang pemerintahan), Kapiten Laut dan Mayor (bidang keamanan), Marinyo (bidang keagamaan) dan sebagainya.

Dari pemerintahan tradisional Kesultanan Tidore hingga pemerintahan Belanda sebelum perang dunia ke-II, semasa penjajahan Pemerintahan Belanda atas kepulauan Indonesia, maka tahun 1935 di Sorong dibuka sebagai *Base Camp Batatese Petroleum Maastchappy* (BPM) dengan pos pemerintah mengambil lokasi pada pulau Doom. Keadaan ini berlangsung sampai dengan tahun 1944, kemudian Sorong diduduki oleh tentara Jepang. Semasa Irian Barat dalam suasana perang antara sekutu melawan Jepang, maka Pemerintah Belanda membentuk satuan pemerintahan sipil yang diberi nama "*Nederlands Indies Civil Administration* (NICA) berkedudukan di Kampung Harapan Jayapura (Hollandia pada waktu itu). Satuan pemerintahan nica ini setelah berakhirnya perang dunia ke-II tahun 1945,

masih berkuasa di Irian Barat sampai tahun 1947. Pada tahun 1947 Pemerintah Belanda mulai menyusun struktur pemerintahan untuk Irian Barat dengan pembagian-pembagian wilayah atas daerah besar dan kecil sesuai dengan keinginannya. Sorong ditentukan sebagai onderafdelijk meliputi distrik-distrik di Kepulauan Raja Ampat dan Semenanjung Doreri. Onderafdelijk ini dipakai oleh seorang Hoofd Van Plaatslijk Bestuur (HPB) dan berkedudukan di Sorong Doom. Kota Sorong Doom ditentukan pula sebagai ibu kota Afdeling West Nieuw Guinea yang wilayahnya meliputi seluruh kepala burung dan Fak-Fak (sekarang Kabupaten Fak-Fak) Afdeling West Nieuw Guinea ini dikepalai oleh seorang Asisten Resident, sedangkan residentnya sebagai kepala propinsi berkedudukan di Jayapura . Hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1949. Pada tahun 1950, Pemerintah Belanda berusaha memisahkan Irian Barat melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), maka Pemerintah Belanda lebih memperkuat kedudukannya dengan membentuk Satuan Pemerintahan yang diberi nama “Het Gouvernement Van Netherlands Nieuw Guenea dikepalai oleh seorang Gouvernelir berkedudukan di Hollandia (Jayapura sekarang)

4.1.1 Letak Dan Kondisi Geografis

Kabupaten Sorong Memiliki Luas Wilayah 13.075,28 Km², Daerah Ini Berbatasan Langsung Dengan Kabupaten Raja Ampat Di Sebelah Utara, Kota Sorong Di Sebelah Barat, Kabupaten Sorong Selatan Di Sebelah Selatan, Serta Kabupaten Tambrauw Dan Kabupaten Maybrat Di Sebelah

Secara topografi Kabupaten Sorong sangat bervariasi mulai dataran rendah dan berawa. Wilayah Kabupaten Sorong hampir 60 persen berupa daerah pegunungan dengan lereng-lereng yang curam seperti Makbon, Moraid, Sausafor,

dan Pulau Salawati terdapat di bagian tengah ke arah timur dan utara. Dua puluh persen topografi Kabupaten Sorong berupa dataran rendah dan sebagian berawa yang menyebar di bagian selatan sampai ke barat. Ketinggian di Kabupaten Sorong bervariasi yaitu wilayah dengan ketinggian di bawah 100 meter umumnya terdapat di Distrik Seget, Beraur sebagian di Distrik Salawati bagian selatan.

1. Daftar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yang Menerima Penyaluran Dana BOSDA di kabupaten Sorong tahun 2023

I. Wilayah Perkotaan adalah Sekolah/Madrasah-Sekolah/Madrasah :

1. SMP Negeri 1 Kabupaten Sorong di Aimas
2. SMP Negeri 3 Kabupaten Sorong di Mariyai
3. SMP Negeri 10 Kabupaten Sorong di Aimas
4. SMP Negeri 11 Kabupaten Sorong di Aimas
5. SMP Negeri 25 Kabupaten Sorong di Aimas
6. SMP Negeri 26 Kabupaten Sorong di Aimas
7. SMP YPK Bethel Mutu Mawolokmai Kabupaten Sorong di Aimas
8. SMP YPPK Petrus Vandepen Kabupaten Sorong di Aimas
9. SMP Shine Secondary School Kabupaten Sorong di Aimas
10. SMP Muhamadyah Kabupaten Sorong di Aimas
11. SMP Muhammadiyah 2 Kabupaten Sorong di Mariyai.
12. SMP It Al Ghuroba Kabupaten Sorong di Aimas.
13. SMP It Al Ikhiar Kabupaten Sorong di Aimas.
14. SMPTK Diaspora Kabupaten Sorong di Aimas Mariat Pantai
15. MTs Negeri Kabupaten Sorong di Mariat.
16. MTs Muhammadiyah 2 Kabupaten Sorong di Aimas
17. MTs Al Maarif 1 Kabupaten Sorong di Aimas

18. MTs Roudlothul Khufaz Kabupaten Sorong di Aimas
19. MTs Darul Istiqomah Kabupaten Sorong di Mariat Gunung
20. SMP Negeri 2 Kabupaten Sorong di Mayamuk
21. SMP Negeri 6 Kabupaten Sorong di Klamono
22. SMP Negeri 9 Kabupaten Sorong di Katapop Salawati
23. SMP PGRI Kabupaten Sorong di Salawati
24. SMP It Nurul Yaqin Kabupaten Sorong di Mayamuk
25. MTs Hidayatulah Kabupaten Sorong di Mayamuk
26. MTs Muhamadiyah 1 Kabupaten Sorong di Salawati
27. MTs Muhamadiyah 3 Kabupaten Sorong di Salawati.
28. MTs Al Maarif 2 Kabupaten Sorong di Mayamuk.
29. SMPIT Alam Mutiara Insan Kabupaten Sorong.

II. Wilayah Pinggiran adalah Sekolah/Madrasah-Sekolah/Madrasah :

1. SMP Negeri 14 Kabupaten Sorong di Klafdalim Moisegen
2. SMP Negeri 15 Kabupaten Sorong di Malamoja Malabotom
3. SMP Negeri 16 Kabupaten Sorong di Malaus Salawati
4. SMP Negeri 18 Kabupaten Sorong di Gisim Darat Klamono
5. SMP Negeri 19 Kabupaten Sorong di Katimin Salawati
6. SMP Negeri 20 Kabupaten Sorong di Yeflio Mayamuk
7. SMP Guppi Kabupaten Sorong di Matawolot Salawati.

III. Wilayah Terpencil adalah Sekolah/Madrasah-Sekolah/Madrasah :

1. SMP Negeri 4 Kabupaten Sorong di Makbon
2. SMP Negeri 13 Kabupaten Sorong di Maladofok Sayosa
3. SMP Negeri 22. Kabupten Sorong di Klafdalim Moisegen
4. SMP Negeri 24 Kabupaten Sorong di Malamkarta Makbon
5. SMP Negeri 29 Kabupaten Sorong di Siwis Klaso
6. SMP Negeri 30 Kabupaten Sorong di Luwelala Maudus

IV. Wilayah Terisolir adalah Sekolah/Madrasah-Sekolah/Madrasah :

1. SMP Negeri 6 Kabupaten Sorong di Seget
2. SMP Negeri 7 Kabupaten Sorong di Kwade Mega
3. SMP Negeri 21 Kabupaten Sorong di Sas Klawak
4. SMP Negeri 23 Kabupaten Sorong di Sayosa
5. SMP Negeri 29 Kabupaten Sorong di Siwis Klaso
6. SMP Negeri 30 Kabupaten Sorong di Luwelala Maudus

V. Wilayah Pesisir / Kepulauan adalah Sekolah/Madrasah Sekolah/Madrasah :

1. SMP Negeri 8 Kabupaten Sorong di Segun
2. SMP Negeri 12 Kabupaten Sorong di Wanurian Beraur
3. SMP Negeri 17 Kabupaten Sorong di Sailolof Salawati Selatan
4. SMP Negeri 27 Kabupaten Sorong di Bangun
5. SMP Negeri 28 Kabupaten Sorong di Waliam Salawati Tengah
6. SMP Lab.School STKIP Muh. Kabupaten Sorong di Arar Mayamuk

VI. Wilayah Satap adalah Sekolah Negeri /Swasta Satap :

1. SMP Negeri Satap Ninjimor Kabupaten Sorong di Ninjemor Moisegen
2. SMP Negeri Satap Klayili Kabupaten Sorong di Klayili
3. SMP Negeri Satap Malaguptup Kabupaten Sorong di Malaguptup Klayili
4. SMP YPK Satap Buk Kabupaten Sorong di Buk.

Besar biaya satuan BOSDA yang diterima oleh Sekolah / Madrasah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan kategori pembagian wilayah sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. SMP/MTs (wilayah Perkotaan) | : Rp 79.990.000,00/ siswa / tahun |
| 2. SMP/MTs (wilayah Pinggiran) | : Rp164.978.000,00/ siswa / tahun |
| 3. SMP/MTs (wilayah Terpencil) | : Rp198.723.000,00/ siswa / tahun |
| 4. SMP/MTs (wilayah Terisolir) | : Rp239.968.000,00/ siswa / tahun |
| 5. SMP/MTs (wilayah Pesisir/Kepulauan) | : Rp314.958.000,00/ siswa / tahun |

6. SMP Negeri / YPK Satap : Rp277.463.000,00/siswa / tahun.

Program BOSDA dan Wajib Belajar 12 Tahun yang Bermutu. Melalui program BOSDA yang terkait Wajib Belajar 12 Tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. BOSDA harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan Wajar 12 tahun yang bermutu;
2. BOSDA harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah/madrasah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis Sekolah/Madrasah dan biaya lainnya;
3. BOSDA harus menjamin kepastian lulusan SMP/MTs dapat melanjutkan ke Tingkat SMA dan SMK sederajat
4. Kepala SMP/ MTs; menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke ke SMA/MA dan SMK sederajat
5. Kepala Sekolah/Madrasah berkewajiban mengidentifikasi anak putus Sekolah/Madrasah dilingkungannya untuk diajak kembali ke bangku Sekolah/Madrasah;
6. Kepala Sekolah/Madrasah harus mengelola dana BOSDA secara transparan dan akuntabel;
7. BOSDA tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela kepada Sekolah/Madrasah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak

ditetapkan jumlahnya, serta tidak mendeskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan.

2 . Organisasi pelaksana BOSDA meliputi Tim Pengarah dan Tim Manajemen Kabupaten serta Tim Sekolah/Madrasah.

Tim Manajemen BOSDA Kabupaten Sorong

1. Penanggung jawab (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong)
2. Ketua Tim
3. Sekretaris Tim
4. Bendahara Tim
5. Anggota Tim

3. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan dan kebudayaan dan Tim Teknis BOSDA Kabupaten Sorong

- a. Melatih, membimbing, dan mendorong sekolah/madrasah untuk memasukkan data pokok pendidikan (Formulir BOSDA) dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh kemdikbud atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Melakukan validasi dan verifikasi data dari Sekolah/Madrasah;
- c. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan data yang dilakukan Sekolah/Madrasah;
- d. Mengkompilasi nomor rekening seluruh Sekolah/Madrasah
- e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong sebagai penanggung jawab Tim Manajemen BOSDA menandatangani naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan melampirkan daftar rekening Sekolah/Madrasah;

- f. Bersama dengan Tim BOSDA melakukan validasi data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah;
- g. Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada Sekolah/Madrasah, komite Sekolah/Madrasah dan masyarakat tentang program BOSDA;
- h. Melakukan pembinaan terhadap Sekolah/Madrasah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOSDA;

4.1.2 Kondisi Sosial Budaya

- **Pendidikan**

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan maupun kedewasaan dalam berdemokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah, dalam hal ini pendidikan adalah sebuah kunci kesuksesan sebuah daerah untuk memajukan daerahnya dengan adanya persaingan kualitas dan mutu masyarakatnya di era sekarang ini.

Tabel 4.1 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sorong

No	Pendidikan	2023
1	Angka melek huruf	4,10 %
2	Rata rata lama sekolah	8,61 %
3	Indeks Pendidikan	68,89 %

Sumber : BPS kabupaten sorong

Gambaran umum tingkat kecerdasan penduduk suatu daerah juga dapat ditunjukkan oleh kemampuan baca tulis atau biasa disebut dengan angka melek huruf. Kemampuan membaca dan menulis merupakan ketrampilan minimum yang dibutuhkan oleh setiap penduduk untuk menuju hidup sejahtera. Dengan kemampuan tersebut seseorang akan lebih mudah dalam mengakses informasi. Kemampuan baca tulis tercermin dari angka melek huruf yang didefinisikan melalui besarnya persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya. Indikator ini menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur melalui aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin tinggi mutu sumber daya manusia suatu masyarakat.

4.1.3 Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Sorong

Dinas pendidikan merupakan salah satu unsur yang melakukan urusan Pemerintahan dibidang pendidikan, dan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan memiliki tugas untuk melakukan wewenang yang berkaitan dengan pendidikan. Dan instansi Dinas Pendidikan ini terdiri dari beberapa bagian yaitu Tata Usaha, Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, Bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Bidan

Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga dan Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu.

1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten sorong

Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong pasti saja tidak luput untuk mewujudkan, melaksanakan, meningkatkan, dan menumbuhkan pendidikan semakin baik, karena pendidikan sangat penting bagi masyarakat terutama untuk anak-anak yang masih duduk di sekolah, karena wajib belajar adalah 12 tahun melalui jalur formal dan nonformal.

Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten sorong menjadikan pendidikan bermutu untuk semua jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Sorong. Dan oleh karena itu Visi Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten sorong adalah : terwujudnya masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan prima.

Sedangkan untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten sorong tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas layanan pendidikan
 2. Meningkatkan Kualitas dan Relevansi Pendidikan
 3. Meningkatkan Daya Saing Pada Semua Jenjang Pendidikan
 4. Meningkatkan Profesionalisme Dalam Penyelenggaraan Pendidikan
- 2 .Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan kebudayaan adalah menjalankan berbagai urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

dibidang pendidikan. Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas dibidang pendidikan dan kebudayaan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas pendidikan dan kebudayaan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas dibidang pendidikan dan kebudayaan
- e. Pelaksanaan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang pendidikan dan kebudayaan.

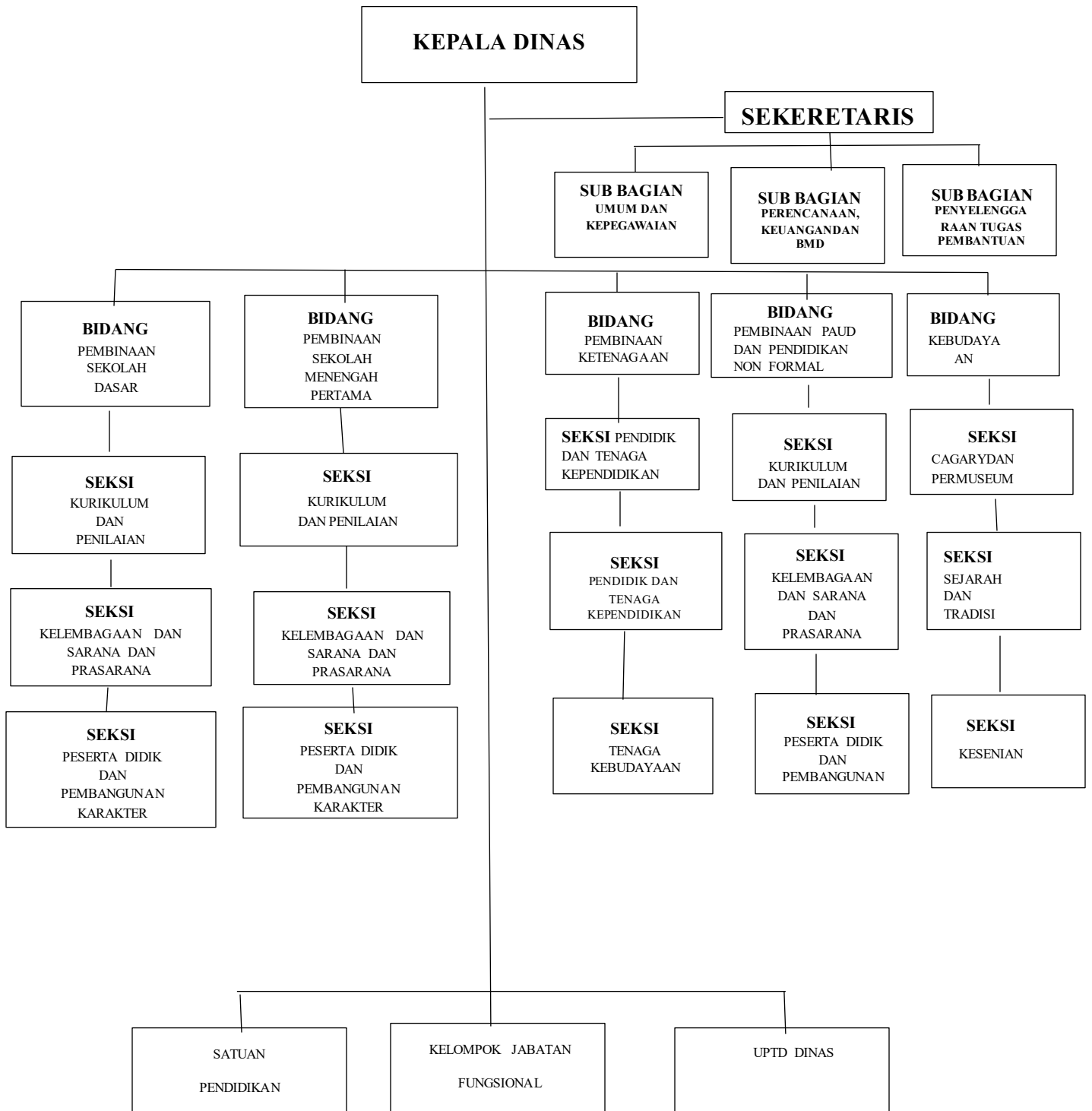
3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sorong disebutkan bahwa susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD
 3. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari :
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pend. Non Formal;
 3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
- f. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal terdiri dari ;
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- g. Bidang Kebudayaan terdiri dari ;
1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 2. Seksi Sejarah dan Tradisi;
 3. Seksi Kesenian.

**Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Sorong**



Sumber: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong

4 . Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Wajib berdasarkan asas otonomi daerah bidang pendidikan, dalam rangka mewujudkan masyarakat cerdas, berprestasi, dan sukses wajib belajar 9 (Sembilan) tahun guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas harmoni, demokratis, damai, sejahtera, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Sorong Baru. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pendidikan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai denganlingkup tugasnya;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan;
- e. Pembinaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pendidikan;
- f. Bertanggung jawab secara fisik dan administrasi terhadap barang milik daerah (aset)
- g. Pembinaan, pengawasan dan penilaian, pejabat esalon III, IV, dan pejabat fungsional serta pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretaris terbagi atas tiga sub bagian, yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD, dan. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan program memiliki tugas menyiapkan bahan-

bahan bimbingan, kebijakan pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD sebagaimana yang di maksud:

- a. Merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan program berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai naaham untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang telah di tetapkan.
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan denan tugas sub bagian perencanaan program.
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bagian perencanaan program sebagai kerangka acuan pedoman penyusunan program dan anggaran kegiatan
- d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas susb bagian perencanaan program serta menyiapkan bahan- bahan dalam rangka pemecahan masalah.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman, dan petunjuk teknis dibidang perencanaan program.
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang dan organisasi perangkat daerah terkait lainnya.

- g. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan rencana kerja tahunan/RKT Dinas, arah kebijakan umum (AKU) rencana kerja organisasi perangkat daerah (RENJA SKPD) dan laporan pertanggung jawaban(LPJ),serta laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP).
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, perencanaan dan anggaran.
- i. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara aparatur dan public untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan.
- j. Menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses pembahasan dengan instansi terkait sampai menjadi DPA.
- k. Menyusun kelengkapan administrasi, guna melaksanakan kegiatan tahunan berupa petunjuk operasional,petunjukan pejabat pelaksanaan teknis kegiatan dan dokumen kontrak dan menyiapkan revisi (perubahan) DPA.
- l. Mengupayakan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBDP) guna menampung usulan program pembangunan yang mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya.
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah- langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya

Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan memiliki tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan di bidang keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian tugas Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana yang di maksud

- a. Merencanakan kegiatan sub bagian keuangan dan aset berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan aset.
- c. Mencari, Mengumpulkan, Menghimpun, Mensistematisasikan, dan Mengelola Data Serta Menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan aset sebagai kerangka acuan pedoman menyusun rencana kegiatan.
- d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan aset serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.
- e. Mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang.
- f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang.

- g. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset.
- h. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat kartu inventaris barang (KIB) dan membuat kartu inventaris ruangan (KIR)
- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja sukarela/kontrak, insentif PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan dinas.
- j. Penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan

Sub bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijaksanaan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana yang di maksud:

- a. Merencanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk meaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah di terapkan.

- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum dan kepegawaian.
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum kepegawaian sebagai kerangka acua/pedoman penyusunan rencana kegiatan.
- d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum dan kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pencegahan masalah.

4.2 Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Sorong

Dalam mengatasi anak putus sekolah tentunya Dinas Pendidikan juga sangat berperan penting dalam mengatasi anak putus sekolah tersebut yang berguna untuk membina anak tersebut untuk tidak putus sekolah dan tetap melanjutkan pendidikannya. Mengatasi anak putus sekolah semata-mata guna untuk menertibkan dan membina memberi pengarahan, pengetahuan untuk anak yang putus sekolah agar anak tersebut tetap melanjutkan pendidikannya dan memiliki arah dalam kehidupannya.

Mengatasi anak putus sekolah itu sendiri adalah upaya untuk memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan dan supaya menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan. Karena pada dasarnya anak putus sekolah adalah anak yang tidak melanjutkan pendidikan, anak putus sekolah juga sebagai suatu proses

berhentinya siswa dan siswi itu secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Anak-anak yang putus sekolah di kabupaten sorong ,terdiri dari jenjang SMP. Staff bidang Pendidikan memberikan pernyataan ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah yaitu faktor ekonomi, lingkungan ,dan keluarga.

1. Peran Norma-Norma

Peran meliputi norma-norma menurut Soejono Soekanto (2012:213) merupakan yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma secara sosial di kenal ada empat meliputi

- a. Cara (*Usage*): lebih menojol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat,akan tetapi hanya sekedar celaan dari induvidu yang dihubunginya.
- b. Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
- c. Tata Kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.

- d. Adat Istiadat (*custom*) , merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan meningkatnya menjadi custom atau adat istiadat. (Soejono Soekanto 2012:174)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong pada Senin,6 mei pukul 10.00 dengan kepala bidang pembinaan SMP Bapak Andreas Taa, S.Ag.

“jadi sebenarnya , anak putus sekolah adalah permasalahan pendidikan yang merupakan kondisi anak yang tidak berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikan sehingga tidak memperoleh ijazah,yang di sebabkan oleh faktor-faktor tertentu,terkait dengan anak putus sekolah jadi itu adalah masalah pendidikan,masalah putus sekolah itu bukan hanya tanggung jawab dari guru saja,sekolah saja, atau dinas pendidikan saja,tetapi juga tanggung jawab beberapa komponen seperti msasyarakat,orang tua, jadi yang kita harapkan dari dinas pendidikan tu bagaimana anak-anak itu bisa melanjutkan sekolah minimal 9 tahun. dari sd 6 tahun dan smp 3 tahun,tetapi dari kondisi yang kita jumpai di lapangan masih terdapat anak putus sekolah,dan anak putus sekolah yang kita jumpai terdapat beberapa faktor yaitu keluarga,ekonomi,lingkungan,dan masalah pemahaman orang tua anak ni akan tetap bersekolah atau anak ini berhenti bersekolah, jadi dengan anak putus sekolah ini sudah jelas bahwa tidak akan mendapatkan tanda tamat belajar dan akan berdampak pada masa depannya (Wawancara Senin 6 Mei 2024 pukul 10.00)” .

Selanjutnya faktor tentang anak putus sekolah yang masih dijelaskan terlebih oleh Bapak Andreas Taa, S.Ag yaitu sebagai berikut :

“faktor anak putus sekolah juga di setujui dengan faktor ekonomi dan lingkungan, faktor ekonomi yang lemah dari orang tua akan memaksa orang tua nya bekerja keras bahwa mungkin harus terpisah dari keluarga sehingga menjadi kurang perhatian kepada anak,dengan keterbatasan ekonomi,menjadikan kebutuhan-kebutuhan untuk biaya pendidikan anak tersebut tidak terpenuhi berdampak anak tak bersekolah dan membantu orang tua. Lingkungan juga bisa mempengaruhi bagi anak yang berada dalam lingkungan teman,keluarga,masyarakat yang kurang

memperhatikan atau rendah pendidikan dan lingkungan yang kurang baik akan berdampak pada anak tersebut yang kemudian ikut dengan pola kehidupan lingkungan (Wawancara senin 6 mei 2024 pukul 10.05)”.

Sedangkan untuk sosialisai terkait anak putus sekolah dijelaskan terlebih oleh Bapak Andreas Taa, S.Ag yaitu sebagai berikut :

kalau dari dinas pendidikan itu kita emang kalau langsung ke siswa nya atau orang tuanya itu tidak, istilah tidak ada kusus dikarenakan dari jumlah siswa yang banyak, orang tua yang banyak tidak memungkinkan kan, tapi terkadang dari sekolah-sekolah melakukan sosialisasi kepada siswa-siswinya bahwa pendidikan itu penting, dan melakukan rapat pertemuan orang tua guna melakukan sosialisai bahwa pendidikan itu penting, dan mewaspadaai agar tidak terjadinya anak putus sekolah. (Wawancara Senin 6 Mei 2024 Pukul 10.15)”.

Kondisi anak putus sekolah di Kabupaten sorong untuk tiga tahun terakhir yakni 2021 sampai dengan 2023, akan di gambarkan oleh tabel berikut :

Tabel 4.2 Kondisi Anak Putus Sekolah di Kabupaten sorong

no	Tingkat pendidikan	Kondisi anak putus sekolah		
		2021	2022	2023
1	SMP	241	254	104

Sumber : dinas Pendidikan kabupaten sorong

Dari Tabel 4.3 menunjukkan kondisi anak putus sekolah pada tahun 2021 jumlah anak putus sekolah mencapai angka 241 anak, pada tahun 2022 naik pada angka 254 anak, dan tahun 2023 kembali mengalami penurunan yang berada pada angka 104 anak .

2. Peran Individu

Menurut (Levinson dalam Soekanto 2009 : 213) Teori Peran individu adalah peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan individu dalam Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah berkaitan dengan pengarahan kepada siswa/siswi agar tidak terjadinya putus sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada hari senin 6 mei 2024 pukul 11.00 di kantor dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten sorong kepala bidang pembinaan SMP Bapak Andreas Taa, S.Ag. :

“kalau untuk memberikan pengarahan terhadap siswa/siswi maupun orang tua kami tidak ada mendatangi langsung,kami dari disdik memberikan surat kepada sekolah-sekolah guna melakukan pengarahan terhadap anak-anak sekolah supaya tidak putus sekolah,upaya disdik untuk mengatasi angka putus sekolah dengan maksimal kan program Indonesia pintar yang menjadi program pemerintah pusat,dalam bentuk bantuan dana pendidikan bagi siswa miskin atau rentan miskin (Wawancara Senin 06 Mei 2024 Pukul 10.20) .

3. Struktur sosial

Menurut (Soejono Soekanto 2012:213) struktur sosial adalah hubungan timbal balik antar posisi-posisi sosial dan peran-peran social yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kelompok dalam sruktur tersebut. Peranan juga dapat dikatakan sebagai rilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat social masyarakat. Struktur sosial dalam Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Tingkat SMP di kabupaten sorong berkaitan dengan program-program-pendidikan untuk mengatasi anak putus sekolah Tingkat SMP

Prilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengembalikan keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh ciri atasan dan bawahan yang dipengaruhi oleh prilaku individu ;

1. Presepsi (*perception*) adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu.
2. Sikap (*attitude*) adalah kesiap siagaan mental yang diorganisasikan melalui pengalaman yang memiliki pengaruh tertentu terhadap tanggapan seseorang terhadap orang, obyek, dan situasi yang berhubungan dengannya.
3. Kepribadaian adalah serangkaian ciri yang relative mantap, kecendrungan dan perangai yang sebageian besar dibentuk oleh faktor keturunan dan oleh faktor-faktor sosial, kebudayaan dan lingkungan.
4. Belajar adalah proses terjadinya perubahan yang relative tetap dalam prilaku sebagai akibat dari praktek. (siswanto,2012:76)

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu komplek penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten sorong senin,06 mei 2024 pukul 11.40 dengan Bapak Andreas Taa, S.Ag. selaku kepala bidang SMP kabupaten sorong mengenai program kerja untuk mengatasi anak putus sekolah anak putus sekolah memberikan pendapat sebagai berikut :

“dalam mengatasi masalah anak putus sekolah disdik melakukannya untuk semua kecamatan yang ada di kabupaten sorong upayanya dengan memberikan edaran agar tidak ada pungutan dari sekolah kepada siswa, penyediaan sapsras, adanya pendidikan kesetaraan (program paket A,B,C) memaksimalkan pengelolaan dana BOS (Wawancara Senin 06 Mei 2024 Pukul 10.23)”.

Selanjutnya penjelasan masih dengan orang yang sama dan waktu tempat yang sama mengenai meningkatnya pencapaian target penyelesaian masalah anak putus sekolah yang di jelaskan Bapak Andreas Taa, S.Ag. selaku kepala bidang SMP kabupaten sorong

“kalau pencapaian target penyelesaian masalah anak putus sekolah ya sudah jelas sudah di lakukan semaksimal mungkin, ya kami berharapnya anak-anak yang bersekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti ini tidak ada lagi yang namanya putus sekolah (Wawancara Senin 06 Mei 2024 Pukul 10.26)”.

Jadi dapat disimpulkan hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai struktur social dalam Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah sudah terlaksana. Hal ini bisa dilihat dari progam kerja dinas pendidikan yang memberi surat edaran kepada sekolah-sekolah agar tidak melakukan pungutan biaya, dan dinas pendidikan memberlakukan program sekolah paket a,b,c untuk anak yang putus sekolah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti kamis 07 Mei 2024 Pukul 14.40 mengenai indikator Stuktur Sosial dalam Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Tingkat SMP Bahwa Dinas Sudah melakukan semaksimal mungkin untuk meningkatkan pencapaian target penyelesaian masalah anak putus sekolah dan disdik juga melakukan program kerja

seperti memberi surat edaran kepada sekolah-sekolah SMP agar tidak memungut biaya terhadap siswa-siswanya.

4.3 Hambatan Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Tingkat SMP

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten sorong terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan mengatasi anak putus sekolah Tingkat SMP di Kabupaten Sorong adalah : Hambatan bagi dinas ini sendiri adalah dinas sudah berupaya memberikan surat edaran berupa bantuan PIP untuk siswa-siswi yang kurang mampu, tetapi masih saja ada anak yang putus sekolah dikarenakan faktor keluarga dan ekonomi,

Hambatan faktor sosial yang dimaksud disini adalah latar belakang orang tua nya yang hanya tamatan sekolah dasar atau tidak tamat sekolah dasar sekali pun dan oleh karena itu orang tua kurang menghargai tentang pentingnya pendidikan. Mereka menyekolahkan anak hanya semata-mata bisa untuk membaca dan menulis saja, karena orang tua anak tersebut beranggapan sekolahnya seseorang kepada jenjang yang lebih tinggi hanya untuk membuang biaya, mereka beranggapan terhadap anak lebih baik membantu orang tuanya bekerja, seharusnya walaupun orang tuanya ada yang tidak tamat sekolah dasar atau hanya sampai sekolah dasar, anaknya bisa menjadi seorang sarjana tetapi ini sangat jarang sekali terjadi. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah di lakukan sebelumnya, diketahui bahwa faktor struktur sosial menjadi salah satu penyebab anak putus sekolah .karena beranggapan bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting untuk masa depan anak, dan lebih memilih membantu bekerja. mereka beranggapan untuk sekolah

tinggi-tinggi sangat membutuhkan biaya yang besar, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih kekurangan. padahal dari Dinas Pendidikan sudah memberikan bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP).

4.4 Faktor-faktor yang Menyebabkan Anak Putus Sekolah

Kondisi anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Sorong cukup memprihatinkan bagi setiap orang terutama bagi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sorong kepala bidang pembinaan SMP Bapak Andreas Taa, S.Ag. bahwa:

faktor anak putus sekolah juga di setuju dengan faktor ekonomi dan lingkungan, faktor ekonomi yang lemah dari orang tua akan memaksa orang tua nya bekerja keras bahwa mungkin harus terpisah dari keluarga sehingga menjadi kurang perhatian kepada anak, dengan keterbatasan ekonomi, menjadikan kebutuhan-kebutuhan untuk biaya pendidikan anak tersebut tidak terpenuhi berdampak anak tak bersekolah dan membantu orang tua. Lingkungan juga bisa mempengaruhi bagi anak yang berada dalam lingkungan teman, keluarga, masyarakat yang kurang memperhatikan atau rendah pendidikan dan lingkungan yang kurang baik akan berdampak pada anak tersebut yang kemudian ikut dengan pola kehidupan lingkungan. (wawancara Selasa 6 Mei 2024, pukul 11.40)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada ibu Maria selaku orang tua dari salah satu anak putus sekolah, pada hari minggu (16 juni 2024) pukul 19.00 WIT mengenai anak putus sekolah

“jemi putus sekolah karna terpengaruhnya dengan teman-teman yang sudah tidak melanjutkan sekolah dan dia ikut tidak bersekolah, dulu pas masih sekolah dia sering tidak masuk, saya sering mendapat surat panggilan dari sekolah (Wawancara Minggu 16 Juni 2024 Pukul 19.00)

Kemudian pertanyaan selanjutnya masih dengan orang yang sama serta waktu tempat yang sama.

“aktifitas anak tersebut sekarang bantu bantu kerja dalam rumah saja dan main dengan teman di komplek kadang ikut kelaut cari ikan (Wawancara Minggu 16 Juni 2024 Pukul 19.22)”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada anak yang putus sekolah yang bernama jemi anak SMP Negri 10 Kabupaten sorong di waktu yang sama

“ikut mamak kerja cari ikan sama siput di pinggir-pinggir bakau,jadi gak sekolah lagi, karna jarang masuk sekolah malas pergi kesekolah lagi (Wawancara Minggu 16 Juni 2024 Pukul 19.25)”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan orang yang sama dan tempat di waktu yan sama mengenai pembelajaran anak di sekolah sebagai berikut:

“kalau belajar kadang susah, karna banyak ketinggalan pelajaran, jadi tidak paham (Wawancara Minggu 16 Juni 2024 Pukul 19.26)”

Pendidikan formal membutuhkan proses belajar mengajar di bangku sekolah dan beberapa jenjang atau tingkat pendidikan mulai dari SMP (Sekolah Menengah Pertama) Namun dalam proses pendidikan secara formal belum dapat terealisasikan secara maksimal disebabkan karena masih adanya kondisi anak putus sekolah .

1. Kurangnya minat anak untuk bersekolah

Anak usia wajib belajar semestinya menggebu-gebu ingin menuntut ilmu pengetahuan namun karena sudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik terhadap perkembangan pendidikan anak, sehingga minat anak untuk bersekolah kurang mendapat perhatian sebagaimana mestinya, adapun yang menyebabkan anak kurang berminat untuk bersekolah adalah anak kurang mendapat perhatian dari orang tua terutama tentang pendidikannya, juga karena kurangnya orang-orang

terpelajar sehingga yang mempengaruhi anak kebanyakan adalah orang yang tidak sekolah sehingga minat anak untuk sekolah sangat kurang.

2. Keadaan keluarga yang tidak harmonis

Pendidikan itu dimulai dari keluarga. Paradigma ini penting untuk dimiliki oleh seluruh orang tua untuk membentuk karakter manusia masa depan bangsa ini. Keluarga adalah lingkungan yang paling pertama dan utama dirasakan oleh seorang anak, bahkan sejak masih dalam kandungan. Karena itu pendidikan di keluarga yang mencerahkan dan mampu membentuk karakter anak yang soleh dan kreatif adalah modal penting bagi kesuksesan anak di masa-masa selanjutnya. Orang tua merupakan orang yang memiliki peranan sangat penting dalam menunjang hak anak terhadap pendidikannya.

Namun, hubungan keluarga tidak harmonis dapat berupa kurangnya perhatian antar anggota keluarga dan terkadang berupa perselisihan keluarga yang berdampak pada perceraian orang tua, dimana hubungan antar keluarga tidak saling peduli, keadaan ini merupakan dasar anak mengalami permasalahan yang serius dan hambatan dalam pendidikannya sehingga mengakibatkan anak mengalami putus sekolah.

3. Lemahnya ekonomi keluarga

Keadaan perekonomian keluarga yang lemah cenderung menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak sering dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga merasa terbebani dengan masalah ekonomi ini sehingga mengganggu kegiatan belajar anak. Kurangnya pendapatan keluarga menyebabkan

orang tua terpaksa bekerja keras mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga pendidikan anak kurang diperhatikan dengan baik dan bahkan membantu orang tua dalam mencukupi keperluan pokok untuk makan sehari-hari misalnya anak membantu orang tua untuk menangkap ikan di sungai atau danau, karena dianggap meringankan beban orang tua anak diajak ikut orang tua untuk bekerja dan meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama yang berdampak pada berhenti atau anak putus sekolah.

4. Teman sepergaulan

Lingkungan tempat tinggal anak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kegiatan dan proses belajar/pendidikan. Oleh sebab itu seyogyanya lingkungan tempat tinggal anak atau lingkungan masyarakat ini dapat berperan dan ikut serta di dalam membina kepribadian anak-anak kearah yang lebih positif.

Suasana lingkungan sebenarnya sangat mempengaruhi proses belajar mengajar bagi anak. Lingkungan yang tenang, nyaman, damai akan mempunyai pengaruh yang baik kepada anak. Seperti halnya dengan teman sepergaulan yang pastinya akan memberi dampak pada sang anak, baik itu bernilai positif ataupun negatif.

Bergaul dan berteman dengan orang yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan yang lebih tinggi dari kita, akan mendatangkan manfaat kepada kita khususnya, dan akan membantu dan memotivasi kita dalam belajar menuntut ilmu. Bila kita menemui kesulitan akan mudah bertanya/minta bimbingan kepada mereka yang lebih tahu.

Selain itu, bergaul dengan orang yang berpengetahuan juga mendatangkan ketentraman, karena diri kita merasa dapat diterima oleh lingkungan dimana kita tinggal. Dengan demikian akan terjalin kerja sama bantu membantu antara sesamanya di dalam mensukseskan pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan.

Bagaimanapun juga adanya pergaulan ini mempunyai pengaruh terhadap sikap, tingkah laku, dan cara bertindak dan lain sebagainya dari setiap individu. Dimana pengaruh tersebut ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif.

5. Pandangan masyarakat akan Pendidikan

Pandangan masyarakat terhadap pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam menempuh pendidikan di bangku sekolah. Pandangan masyarakat yang maju tentu berbeda dengan masyarakat yang keterbelakangan atau tradisional, masyarakat yang maju tentu pendidikan mereka maju pula, demikian pula anak-anak mereka akan menjadi bertambah maju pula pendidikannya dibanding dengan orang tua mereka.

Maju mundurnya suatu masyarakat, bangsa dan negara juga ditentukan dengan maju mundurnya pendidikan yang dilaksanakan. Pada umumnya masyarakat yang terbelakang atau dengan kata lain masyarakat tradisional mereka kurang memahami arti pentingnya pendidikan, sehingga kebanyakan anak-nakan mereka tidak sekolah dan kalau sekolah kebanyakan putus di tengah jalan.

Hal tersebut bisa terjadi karena mereka beranggapan sekolah sangat sulit, merasa tidak mampu, mempengaruhi, buang waktu banyak, lebih baik bekerja sejak

anak-anak ajakan membantu orang tua, tujuan sekolah sekedar bisa membaca dan menulis, juga karena anggapan mereka tujuan akhir dari sekolah adalah untuk menjadi pegawai negeri, hal ini tentu karena kurang memahami arti, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional.

Namun, tidak dipungkiri masih adanya sebagian kecil masyarakat menganggap pendidikan itu kurang penting. Alasannya adalah sekolah tidak menjamin orang bisa hidup mewah atau miskin, karena ada yang orang yang tidak sekolah tapi bisa hidup mewah karena mereka bekerja, sekolah hanyalah untuk orang yang berada. Budaya seperti ini juga nampaknya masih mengakar di masyarakat.

Masih kurangnya pemahaman yang komprehensif terhadap arti penting pendidikan mengakibatkan sebagian kecil masyarakat bersikap apatis terhadap pendidikan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Andreas Taa, S.Ag.

“Di Kabupaten Sorong sendiri, perhatian dan pandangan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bisa dikatakan masih sangat kurang, hal ini ditandai dengan anak yang berhenti sekolah terkadang dikarenakan karena membantu orang tua bekerja atau berdagang. Pemerintah sudah berupaya meningkatkan mutu pendidikan, tapi masyarakat belum mengerti akan pentingnya sebuah pendidikan, sehingga banyak orang menyesal dikemudian hari”. (wawancara, Senin 6 Mei 2024, Pukul 12.47)

Padahal Fungsi Pendidikan Nasional Bukan Demikian, Hal Ini Sebagaimana Tergambar Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Pasal 3 : *“pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan upaya tujuan nasional.”*

Demikian juga tujuan pendidikan nasional bukan seperti anggapan masyarakat tradisional, yang mana tujuan pendidikan nasional sebagaimana juga yang termuat dalam undang-undang RI nomor 20 tahun 2003, pasal 4:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk terbentuknya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab “

Masyarakat yang jika memahami fungsi dan tujuan pendidikan nasional pada akhirnya akan menjadi masyarakat yang maju dan berkembang. Masyarakat yang terpencil atau masyarakat yang tradisional juga beranggapan bahwa sekolah itu pada dasarnya sedikit sekali yang sesuai dengan kehendak mereka, misalnya begitu tamat sekolah langsung mendapatkan pekerjaan, sekolah hendaknya tidak memerlukan biaya yang banyak, dan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Mungkin jika pendidikan yang ada itu dapat sesuai dengan kehendak mereka maka masyarakatpun juga akan mendukungnya, namun semua itu hanya keinginan mereka tanpa harus berjuang dan berusaha secara maksimal. Masyarakat dalam hal ini harus memiliki pandangan dan tanggung jawab akan pentingnya pendidikan .

BAB V

PENUTUP

5.1 kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penelitian mengenai Analisa Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Kasus Anak Putus Sekolah Tingkat SMP di Kabupaten Sorong maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Norma-Norma

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil peranan norma-norma dari segi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong sudah berupaya melakukan yang terbaik seperti sudah memberikan surat edaran ke sekolah-mengenai bantuan PIP untuk siswa-siswi yang kurang mampu, guna untuk membantu siswa-siswi tersebut agar tidak putus sekolah. Tetapi masih saja ada anak yang tidak ingin melanjutkan sekolah dengan alasan faktor ekonomi. Oleh karena itu anak kadang dibawa oleh orang tua untuk membantu pekerjaan orang tua.

2. Peranan Individu

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil peranan individu yang di dapat dari lapangan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong sudah berupaya membantu dengan adanya bantuan seperti PIP, akan tetapi rendahnya minat belajar siswa dikarena keterbatasan kemampuan

orang tua dalam memberikan kebutuhan finansialnya. sehingga mengharuskan anak tersebut membantu orang tuanya bekerja.

3. Struktur Sosial

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Struktur Sosial adalah dari kalangan lingkungan dapat disimpulkan bahwa lingkungan juga mempengaruhi terjadinya anak putus sekolah, lingkungan pergaulan anak ini sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap anak, karena bisa memberikan pengaruh yang buruk terhadap anak, lingkungan masyarakat juga sangat turut mempengaruhi terhadap perkembangan dan pertumbuhan setiap anak yang berdampak pada pendidikan anak. Namun lingkungan masyarakat kurang mendukung karena disini terdapat anak putus sekolah lantaran terpengaruh terhadap teman-temannya yang sudah tidak sekolah. karena sudah berani merokok, menjadi anak tersebut malas bersekolah. Kurangnya motivasi dan dukungan dari keluarga : keluarga adalah peran utama dalam kegiatan belajar anak. karena peran orang tua adalah membimbing, memberikan perhatian dan kondisi perekonomian orang tua menjadi pengaruh keberhasilan pendidikan anak. tetapi kurangnya bimbingan dan perhatian orang tua kepada anak dapat membuat anak berdampak pada kurangnya minat belajar anak tersebut. dan tingkat kesadaran tentang pendidikan anak pun kurang.

5.2. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada kepala dan seluruh staff Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong agar lebih memperhatikan dan memberikan sosialisasi terhadap sekolah-sekolah, siswa-siswi, dan orang tua siswa mengenai dampak yang terjadi jika anak di usia dini putus sekolah, karena sangat berpengaruh ke masa depan anak tersebut. pentingnya melakukan sosialisasi ialah jangan sampai terjadi anak-anak putus sekolah karena pendidikan itu sangat penting, agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah.
2. Kepada kepala dan seluruh staff Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong agar merancang dan memaksimalkan program kerja pendidikan, seperti program belajar pada sekolah nonformal paket A,B,C untuk anak yang putus sekolah tersebut bisa melanjutkan sekolah.
3. Kepada orang tua yang harus lebih giat mencari nafkah keluarga agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan supaya anak tidak ikut terbebani dengan ikut orang tua bekerja, dan anak akan lebih berfokus ke pendidikannya
4. Kepada masyarakat agar lebih mengawasi pergaulan anak-anak dan lebih memberi nasehat atau menegur anak-anak jika merokok dan menongkrong hampir larut malam, agar menghindari terjadinya anak putus sekolah. Kepada anak-anak yang putus sekolah agar tetap semangat terus dalam berusaha belajar, selalu membangun motivasi kepada diri sendiri, dan tidak mudah putus harapan sehingga mampu menyelesaikan jejanjang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim. 2020. Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah. *Jurnal Pendidikan Vol 21. No 2* Hlm 122-132 BPS Provinsi Aceh : Nanggroe Aceh Darussalam
- Abdulrahman Adi Sukma. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Untuk Berwirausaha*. Skripsi. Universitas Gunadama Fakultas Ekonomi : Jakarta
- Ali Imron. 2004. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Departmen Pendidikan Nasional : Malang
- Al Kholofatus Sholekhah. 2018. *Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Desa Karangrejo Kecamatan Metro Utara*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro : Lampung
- Angqib Lati Wid'aini. 2021. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar di Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020/2021. Skripsi. Universitas Islam Negeri Mataram : Lombok
- Arini Eka Putri. 2018. Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar. *Dalam Jurnal Penelitian Geografi Vol. 6 (5)*. Universitas Lampung : Lampung
- Arya Dwiandana Putri, & N. Djinar Setiawina. 2013. Pengaruh Umur, Pendidikan, Pekerjaan terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Desa Berandem. Bali: Jurnal. Universitas Udayana E-Jurnal EP Unud, Volume 2 No. 4. Hal 173-180
- Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, Cet II, Jakarta : PT Rineka Cipta 2007. Ali Imron. Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah. Malang, Departmen Pendidikan Nasional, 2004.
- Ahmad Yaneri, Nike Vonika, Vivi Suviani. 2022. " Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah Bagi Keluarga Miskin". *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial* 4 No, 1 : 76-89

- Ayu Budi Lestari, Fariz Kurniawan, Rival Bayu Ardi. 2020.” Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD)”. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar* 4 No, 2 : 300-308
- Arifin, Indar. 2010. Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik di Kabupaten Wajo. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Bagong Suyanto, Masalah Sosial Siswa, Jakarta: Kencana, 2010.
- Damayanti, Whanty. 2006. *Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kecerdasan Anak Didik Pada Lembaga Pendidikan Swasta Di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara*. Program Studi Ilmu Pemerintahan: Universitas Hasanuddin.
- Dewi Mutiah, Ahmad, Septi Gumiandari. 2020. Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Anak Putus Sekolah di Tingkat SD Kabupaten Cirebon. *Jurnal Edum Vol 3 No 1* Hlm 161-178
- E.M Sweeting dan Muchlisoh Laporan teknis No. 18b, *Beberapa Penyebab Murid Mengulang Kelas, Putus Sekolah, Dan Melanjutkan Sekolah Dari SD Ke SLTP*. Jakarta :Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998
- Emzir, Metode Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Gadjong, Agus Salim Andi. 2007. Pemerintahan Daerah. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Mustari, Andi Kasmawati, Riswan. 2022.” *Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penanganan Anak Putus Sekolah Di desa Rappolemba Tompobulu kabupaten Gowa*”. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 9 No, 3 : 210-217
- Mudyahardjo, Redja. 2012. Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia Rajawali Pers: Jakarta.
- M. Sukardjo dan Ukim Komarudin, Landasan Pendidikan Islam, Cet. II, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Meti Rosiani, Perceraian Dan Kelanjutan Pendidikan Anak, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2001)
- Nasution, S. 2010. Sosiologi Pendidikan. Bumi Aksara. Jakarta.

Refika Aditama: Bandung Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyat, Ilmu Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta. 2003.

Sarundajang, S.H. 2011. Babak Baru Sistem Pemerintahan. Kata Hasta Pustaka. Jakarta.

Sugiyono. 2011. Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D. Alfabeta: Bandung.

Suharto,Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat “Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial”.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

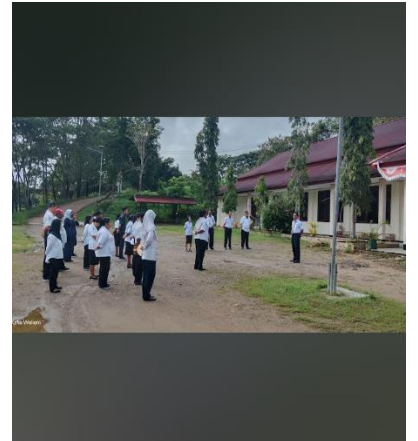
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perlibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan

LAMPIRAN

A. Foto Responden



B. Foto lokasi penelitian



LAMPIRAN

C. Foto anak SMP putus sekolah bersama orang tua siswa putus sekolah



Pedoman Wawancara

Identitas Diri

Nama : Andreas Taa, S.Ag.

Jabatan : *Kepala Bidang Pembinaan SMP*

Alamat : Jalan Klamono KM 24 Aimas

Pendidikan terakhir : S1

DAFTAR PERTANYAAN

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah dinas pendidikan memberikan sosialisai terkait anak putus sekolah	kalau dari dinas pendidikan itu kita emang kalau langsung ke siswa nya atau orang tuanya itu tidak, istilah tidak ada kusus dikarenakan dari jumlah siswa yang banyak,orang tua yang banyak tidak memungkinkan,tapi terkadang dari sekolah- sekolah melakukan sosialisasi kepada siswa-siswinya bahwa pendidikan itu penting,dan melakukan rapat pertemuan orang tua guna melakukan sosialisai bahwa pendidikan itu penting,dan mewaspadaai agar tidak terjadinya anak putussekolah

2	<p>Bagaimana pemerintah kabupaten sorong bertanggung jawab dalam menjamin dan memenuhi hak dasar Masyarakat akan layanan dan peningkatan pendidikan</p>	<p>Ya betul, bisa di lihat dari besarnya alokasi anggaran yang telah digelontorkan Pemerintah Pusat dan Daerah disektor pendidikan membuktikan keseriusan dan besarnya perhatian pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sorong,</p>
3	<p>Apakah pemerintah daerah memberikan bantuan kepada siswa kurang mampu</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Sorong dalam hal ini Dinas Pendidikan atau Sekolah terkait telah mengoptimalkan dari segi pendataan siswa yang seharusnya dan selayaknya mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi untuk meringankan beban orang tua dan sebagai upaya pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pendidikan</p>
4	<p>Faktor apa saja yang menjadi penyebab anak putus sekolah</p>	<p>Dari sebagian siswa yang putus sekolah disebabkan oleh kurangnya kemauan anak untuk sekolah. Hal ini terlihat dari anak-anak yang putus sekolah itu malas datang ke sekolah. Faktornya lain</p>

		adalah ekonomi orang tua anak tidak mampu mendukung pendidikan anak.
5	Adakah faktor lain selain factor ekonomi yang menjadi penyebab anak putus sekolah	di Kabupaten Sorong sendiri, perhatian dan pandangan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bisa dikatakan masih sangat kurang, hal ini ditandai dengan anak yang berhenti sekolah terkadang dikarenakan karena membantu orang tua bekerja atau berdagang. Pemerintah sudah berupaya meningkatkan mutu pendidikan, tapi masyarakat belum mengerti akan pentingnya sebuah pendidikan, sehingga banyak orang menyesal dikemudian hari
6	Apa saja program yang dilakukan pemerintah daerah untuk menangani permasalahan anak putus sekolah Tingkat smp	mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, bantuan dana pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, dan program bantuan siswa miskin (BSM), serta sosialisasi kepada masyarakat.

7	Selain pemerintah siapa lagi yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah anak putus sekolah	orang tua itu sangat penting dengan memberikan motivasi-motivasi, rasa peduli, menyemangati, mensupport, memberi perhatian serta memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya di sekolah dan mengontrol pergaulan anak, sehingga anak dapat termotivasi kembali untuk bersekolah untuk menggapai cita-citanya demi masa depan yang lebih baik dengan pendidikan.
8	Bagaimana Upaya yang harus dilakukan pemerintah agar tidak terjadi masalah putus sekolah dalam bidang pendidikan	dapat diketahui upaya sekolah untuk mengatasi faktor penyebab anak putus sekolah di kabupaten sorong baik itu faktor internal maupun eksternal dengan memperbaiki sarana sekolah, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dan memberikan perlengkapan kegiatan-kegiatan sekolah agar sekolah menjadi nyaman bagi siswa dan tidak lagi bolos-bolosan, serta menjalin kedekatan dengan siswa dan orang tua siswa apabila ada masalah yang

		dihadapi yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah siswa sehingga cepat dicarikan solusi agar anak tetap melanjutkan pendidikan.
9	Apa program kerja untuk mengatasi anak putus sekolah anak putus sekolah	dalam mengatasi masalah anak putus sekolah disdik melakukannya untuk semua kecamatan yang ada di kabupaten kepulauan meranti upayanya dengan memberikan edaran agar tidak ada pungutan dari sekolah kepada siswa, penyediaan sapsras,adanya pendidikan kesetaraan(program paket A,B,C) memaksimalkan pengelolaan dana BOS
10	mengenai meningkatnya pencapaian target penyelesaian masalah anak putus sekolah	kalau pencapaian target penyelesaian masalah anak putus sekolah ya sudah jelas sudah di lakukan semaksimal mungkin,ya kami berharapnya anak-anak yang bersekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti ini tidak ada lagi yang namanya putus sekolah

Pedoman Wawancara

Identitas Diri

Nama : ibu maria (orang tua siswa putus sekolah)

Alamat : SP 1 Tugu Merah

no	Pertanyaan	jawaban
1	Kenapa jemi putus sekolah ibu	jemi putus sekolah karna terpengaruhnya dengan teman-teman yang sudah tidak melanjutkan sekolah dan dia ikut tidak bersekolah,dulu pas masih sekolah dia sering tidak masuk,saya sering mendapat surat panggilan dari sekolah
2	Setelah putus sekolah kira kira aktifitas apa yang dia lakukan bu	aktifitas anak tesebut sekarang bantu bantu kerja dalam rumah saja dan main dengan teman di komplek kadang ikut kelaut cari ikan

Identitas Diri

Nama : Jemi (anak SMP putus Sekolah)

Alamat : SP 1 Tugu Merah

No	Pertanyaan	jawaban
1	Kenapa putus sekolah jemi	ikut mamak kerja cari ikan sama siput di pinggir-pinggir bakau,jadi gak sekolah lagi, karna jarang masuk sekolah malas pergi kesekolah lagi
2	Kalau dulu masih sekolah jemi rasa bagaimana pas belajar dalam kelas	kalau belajar kadang susah, karna banyak ketinggalan pelajaran, jadi tidak paham